

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan legislatif sebuah proses untuk mencapai kebebasan berdemokrasi dalam menentukan calon wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Masyarakat atau rakyat dapat memilih langsung calon figur yang mereka senangi sedangkan figur yang dipilih tersebut adalah sosok yang mendapat apresiasi dari partai yang mengusung mereka. Sehingga, tak jarang elektabilitas partai yang mengusung tersebut juga mempengaruhi perolehan suara dari calon wakil rakyat tersebut. Semakin baik citra partai yang mengusung calon wakil rakyat tersebut maka semakin baik pula perolehan suara wakil rakyat tersebut sebab apabila partai tersebut sudah tidak diminati masyarakat maka partisipasi masyarakat untuk memilih menjadi berkurang atau bahkan tidak bisa mendongkrak hasil suara wakil rakyat tersebut.¹

Pemilihan legislatif sekarang ini telah membuat masyarakat menjadi sangat kritis dalam memilihnya, tak jarang banyak kriteria yang ditetapkan masyarakat dalam memilih salah satunya adalah wakil rakyat atau calon wakil rakyat tersebut dapat menyuarakan aspirasi dari masyarakat dan dapat membawa masyarakat kearah yang lebih baik mulai dari pembangunan secara fisik maupun sumberdaya manusia. Itulah yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Sehingga,

¹ Muhadam Labolo, *Partai Politik Dan System Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Depok : Rajawali Press). Hal. 47.

apabila calon wakil rakyat itu tidak memiliki kriteria tersebut, maka masyarakat dapat dipastikan tidak akan memilih mereka. Sehingga, bagi partai politik dan wakil rakyat tersebut harus dapat menarik simpati masyarakat pada saat kampanye karena sejatinya masyarakat itu dapat menilai layak atau tidaknya calon wakil rakyat tersebut melalui kampanye yang dilakukannya bersama partai politik yang mengusung mereka.

Salah satu tahapan dari pemilu legislatif yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby, dll. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu, kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan mempengaruhi suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku. Itulah pelaksanaan yang disepakati dalam sopan santun politik.²

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampu pemimpin.

² Roem Topatimasang, *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*, (Jakarta : Maarif Institute, 2011), hal. 92

Partisipasi politik merupakan apresiasi dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat.³

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, penulis melihat bahwa partisipasi politik masyarakat di Musi Banyuasin semakin membaik dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014. Pada tahun 2014, masyarakat Musi Banyuasin menilai bahwa semua partai politik itu sama. Mereka beranggapan bahwa partai politik tersebut hanya bertujuan untuk mementingkan golongan mereka saja. Sehingga apabila bukan bagian dari golongan mereka maka mereka tidak akan mensejahterakan kita sebagai rakyat mereka. Mereka hanya mementingkan kepentingan partai politik bukan kepentingan rakyat. Padahal, ketika melakukan kampanye mereka berjanji untuk mensejahterakan masyarakat Musi Banyuasin dengan berbagai macam program yang mereka tawarkan. Akan tetapi, setelah mereka mendapatkan posisi yang baik dalam legislatif tersebut mereka lupa dengan janji mereka untuk mensejahterakan rakyat Musi Banyuasin. Masyarakat Musi Banyuasin pun merasa kecewa dengan hal tersebut. Sehingga, untuk periode yang akan datang masyarakat Musi Banyuasin merasa harus lebih kritis lagi dengan partai politik yang akan mereka pilih terlebih-lebih terhadap Calon Legislatif yang diusung oleh partai tersebut.⁴

Pada tahun 2019, masyarakat Musi Banyuasin sangat mengkritisi sekali tentang program yang dilakukan oleh caleg maupun partai politik. Mereka melihat

³ Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal. 3-4.

⁴ Observasi di Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 21 Juni 2019.

program yang harus diusung oleh caleg harus pro rakyat atau memihak kepada rakyat Musi Banyuasin. Apabila caleg tersebut tidak memiliki program yang memihak pada masyarakat maka elektabilitas caleg tersebut akan berkurang. Sehingga masyarakat Musi Banyuasin tidak akan memilih caleg dari partai politik yang tidak memihak pada rakyat tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari para caleg yang tidak memiliki program dan tujuan jelas dalam mencalonkan diri yang hanya dimunculkan untuk memenuhi kuota saja dari parpol tersebut maka dapat dipastikan tidak akan mendapat dukungan masa secara luas.

Berdasarkan pengamatan masyarakat Musi Banyuasin, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sangat baik oleh masyarakat Musi Banyuasin, partai PKS menawarkan program- program yang memihak pada masyarakat Musi Banyuasin. Sehingga, pada tahun 2019 ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meningkat elektabilitasnya. Sehingga, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan suara yang banyak atau partisipasi politik masyarakat Musi Banyuasin semakin meningkat terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Berdasarkan *quikcount* Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih hampir 9%, jumlah tersebut naik hampir 40% di banding pemilihan legislatif tahun 2014 lalu yang hanya sekitar 6,5%. Banyak orang yang memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) walaupun banyak dari politisi partai tersebut yang tersandung kasus korupsi. Kasus korupsi yang menimpa petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada saat itu adalah kasus korupsi impor sapi. Sehingga pada tahun 2014 lalu suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menurun di Musi Banyuasin dan calon legislatif yang diusung oleh Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) tidak bisa menduduki legislatif Provinsi Sumatera Selatan.⁵

Penjelasan tentang kasus korupsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut : “ Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senen tanggal 9 Desember 2013 malam memvonis Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaq dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Menurut hakim, Lutfi Hasan Ishaq bersama rekannya Ahmad Fathanah terbukti menerima suap Rp. 1,3 Miliar dari Direktur Utama PT. Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Maria Elizabeth Liman menjanjikan total Rp. 4 Miliar apabila penambahan 8.000 ton daging sapi disetujui Kementerian Pertanian. Uang itu di terima Lutfi Hasan Ishaq ketika masih menjabat anggota Komisi I DPR RI dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).⁶ Secara singkat dapat dijelaskan bahwa yang melatarbelakangi Lutfi Hasan Ishaq yang terlibat kasus korupsi kuota impor daging sapi adalah Ahmad Fathanah mempertemukan Lutfi Hasan Ishaq dengan Maria Elizabeth dan Elda di Restoran Angus Stiek Chase Plaza. Dalam pertemuan tersebut Maria Elizabeth meminta Lutfi Hasan Ishaq membantu pengurusan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8,000 ton, permintaan itu di sanggupi terdakwa dengan mengarahkan Maria Elizabeth mempersiapkan bahan untuk bertemu dengan Menteri Pertanian Suswono. Setelah pengarahan tersebut, Ahmad Fathanah meminta Maria Elizabeth agar menunjukkan komitmennya dalam membantu dana

⁵ Sekertaris DPD PKS Musi Banyuasin.

⁶ <http://www.voaindonesia.com>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

kepada Lutfi Hasan Ishaq untuk bantuan dukungan dana kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).⁷

Selain itu ada juga kasus yang menimpa petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, kasus suap bermula ketika Raimon Iskandar, Darwin AH, Islan Hanura, dan Aidil Fitri selaku unsur pimpinan DPRD memutuskan meminta uang sebesar Rp. 20 Miliar kepada Pemerintah Musi Banyuasin untuk kelancaran pengesahan APBD dan LKPJ. Delapan ketua Fraksi Musi Banyuasin juga disebut ikut meminta suap tersebut, diantaranya Ujang Amin (Fraksi PAN), Bambang Kariyanto (Fraksi PDIP), Jaini (Fraksi Golkar), Adam Munandar (Fraksi Gerindra), Parlindungan Harahap (Fraksi PKB), Depy Irawan (Fraksi Demokrat), Iin Pebrianto (Fraksi Demokrat), dan Dear Fauzul Azim (Fraksi PKS). Sementara, angka uang pelican Rp. 20 Miliar di dapat atas penghitungan 1% dari total belanja modal Rp. 2 Triliun. Bambang Kariyanto yang didapuk sebagai koordinator kemudian menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Pahri Azhari melalui Syamsuddin dan Faisyar. Kemudian Bambang Kariyanto melobi jumlah penyetoran duit dengan istri Bupati Pahri Azhari dan juga anggota DPRD Sumatera Selatan, Lucianty. Namun, Lucianty hanya menyanggupi Rp. 13 Miliar, sehingga kesepakatan pun belum disepakati oleh kedua belah pihak. Bambang Kariyanto dan Adam Munandar beserta pimpinan DPRD pun kembali berunding. Mereka sepakat meminta Lucianty untuk menyetor duit senilai Rp. 11,5 Miliar untuk 33 anggota DPRD, Rp. 3,6 Miliar untuk delapan Ketua Fraksi, Rp. 1,65 Miliar tiga

⁷ m.liputan6.com, Moch Harun Syah, diakses pada tanggal 12 September 2019.

Wakil Ketua DPRD dan Rp. 750 Juta untuk Ketua DPRD. Kedua pihak pun sepakat berjumpa mencari titik temu pada 9 Februari 2015 di Rumah Dinas Pahri Azhari. Lucianty menjamin duit untuk para anggota dewan dapat segera diambil. Uang muka suap senilai Rp. 2,6 Miliar lalu disetor untuk sejumlah anggota legislatif. Sebelum pengesahan APBD pada April 2015, pimpinan DPRD kembali meminta setoran duit suap. Pahri Azhari dan Lucianty menyetujui dan sebagian duit suap diberikan lagi pada tanggal 19 Juni 2019 oleh Syamsuddin dan Faisyar. Akan tetapi, pelunasan pernah terjadi. Syamsuddin dan Faisyar lebih dulu ditangkap penyidik KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah Bambang Kariyanto di Palembang pada 19 Juni 2015. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka yakni, Ketua DPRD Musi Banyuasin Ramon Iskandar, Wakil Ketua DPRD Musi Banyuasin Darwin AH, Islan Hanura serta Aidil Fitri. KPK sebelumnya juga telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya Lucianty yang juga Anggota DPRD Sumatera Selatan sebagai tersangka. Mereka menyusul empat tersangka sebelumnya yang lebih dulu dijerat KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Keempat tersangka sebelumnya, yakni Anggota DPRD Musi Banyuasin dari Fraksi PDIP Bambang Kariyanto, Anggota DPRD Musi Banyuasin dari Fraksi Gerindra Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Musi Banyuasin Syamsuddin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Musi Banyuasin Faisyar.⁸

⁸ m.cnnindonesia.com, Joko Panji Sasongko, diakses pada tanggal 22 September 2019.

Dari beberapa kasus tersebut maka Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai yang pernah memiliki reputasi yang cukup buruk di masyarakat Musi Banyuasin, dimulai dari Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq terkena kasus korupsi kuota impor daging sapi tahun 2014 ditambah ketua DPD PKS yang terpilih menjadi anggota dewan terseret kasus korupsi bersama Bupati Musi banyuasin Pahri Azhari dan istrinya Lucianty beserta para anggota-anggota dewan dari fraksi lainnya yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat Musi Banyuasin, hal ini dapat dilihat hilangnya kursi DPRD untuk provinsi pada Pemilihan Legislatif 2014 dan suara PKS yang mengalami stagnasi.

Sedangkan pada Pemilihan Legislatif 2019, PKS merestorasi ulang program dan struktur internalnya, sehingga mendapat kepercayaan lebih di mata masyarakat Musi Banyuasin. Hal ini dapat dilihat dari cerminan dukungan yang meningkat drastis yaitu 100% suara, yang tadinya pada pemilihan legislatif 2014 PKS hanya mengantongi 15.625 suara, pada tahun 2019 ini PKS mendapat dukungan sebesar 30.321 suara.

Melihat penjelasan diatas, masyarakat Musi Banyuasin adalah masyarakat yang sangat kritis terhadap figur dalam sebuah partai. Disamping melihat figur dari calon wakil rakyat. Mereka juga melihat partai yang mengusung calon wakil rakyat tersebut. Sehingga, bagi mereka kredibilitas dan citra partai politik itu adalah salah satu patokan untuk menentukan pilihan wakil rakyat tersebut. Tak jarang ketika memilih, mereka harus mengetahui dulu partai politik tersebut. Ketika partai politik itu sudah dinilai tidak baik, maka mereka tidak akan memilih calon wakil rakyat tersebut.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai politik yang mampu memulihkan citranya dimata masyarakat Musi Banyuasin dan dinilai baik sehingga menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) partai yang digandrungi oleh masyarakat Musi Banyuasin dan membuat hasil suara PKS menjadi meningkat pada Pemilihan Legislatif 2019 di Musi Banyuasin.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini dengan judul “Analisis terhadap strategi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019”. Dengan harapan dapat menambah wawasan politik tentang partai PKS pada Pemilihan Legislatif di Musi Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi politik Partai Keadilan sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. Lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam pengembangan Ilmu Politik, khususnya berkaitan dengan strategi Partai Keadilan Sejahtera.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sebagai salah satu calon sarjana Ilmu Politik yang ingin langsung terjun ke dunia politik, sebagai salah satu masukan bagi elit politik dalam rangka meningkatkan eksistensi partai guna siap untuk berkompetisi dengan partai-partai lain, serta sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa yang akan mengajukan penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelusuran karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan politik menjadi acuan bagi penulis dalam menulis skripsi ini, karya-karya yang menjadi acuan penulis adalah sebagai berikut :

Skripsi dari Abdullah yang berjudul “ *Membangun Citra Partai Politik Masa Depan (Studi Deskriptif Strategi Humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman DIY dalam Membangun Citra)*. “ Skripsi ini berisi tentang strategi humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman adalah menilai sikap masyarakat (politik) agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijaksanaan organisasi partai karena mulai dari aktivitas, program yang dijalankan, tujuan (*goals*) hingga sasaran (*target*) yang hendak dicapai oleh strategi Humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman tidak terlepas dari dukungan serta kepercayaan positif dari pada publik figurinya. Dalam menjalankan tugasnya, maka fungsi Strategi Humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman dapat dirumuskan sebagai berikut : menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama yaitu mendorong publik untuk berperan serta dalam aktivitas yang diselenggarakan oleh pihak humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman, agar tercipta perubahan sikap dan penilaian (perubahan dari situasi negatif diubah menjadi situasi yang positif). Membina hubungan yang harmonis antara pihak Humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman dengan publiknya dengan cara menyampaikan informasi atau pesan berdasarkan kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan

tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman atau sebaliknya. Melayani keinginan publiknya melalui perubahan sikap dan penilaian terhadap pimpinan manajemen maka pembinaan atau pengembangan terus menerus dilakukan agar peran serta tersebut terpelihara dengan baik. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, humas sebagai komunikator dan sekaligus mediator berupaya membentuk sikap dan pendapat yang positif dari masyarakat melalui rangsangan atau stimulasi tertentu.⁹

Skripsi dari Hendra Fauzi yang berjudul “ *Strategi Politik Calon Legislatif Perempuan Dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif 2009 (Studi Pada Calon Legislatif Perempuan di Dapil 6 Kecamatan Natar, Lampung Selatan)*” Hasil penelitian skripsi ini adalah peran parpol dalam mengawal caleg perempuannya masih sangat minim. Strategi politik caleg perempuan terangkum dalam marketing politik meliputi 4Ps, Produk (*Product*), Promosi (*Promotion*), Harga (*Price*), dan Tempat (*Place*). Produk politik dibagi dalam tiga kategori yaitu, *Party Platform (Platform Partai)*, *Past Record*, *Personal Characteristic* (Ciri Pribadi). Promosi dapat dijabarkan dalam tiga jenis yaitu, *advertising*, publikasi dan event debat. Harga digolongkan dalam tiga hal yaitu, harga ekonomi, harga psikologis dan harga *image* (Citra) nasional. Caleg Kabupaten, Provinsi dan RI melakukan kampanye secara bersama-sama. Caleg perempuan menggunakan jaringan sosial, jaringan media, jaringan keagamaan, jaringan kekerabatan, melakukan pendekatan secara psikologis dan sosiologis, dan pendekatan tokoh politik. Caleg perempuan juga menghadapi konflik internal partai politik (konflik

⁹ Abdullah, *Membangun Citra Partai Politik Masa Depan (Studi Deskriptif Strategi Humas PPP Sleman DIY dalam Membangun Citra)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta : 2011).

horizontal dan vertikal), dan konflik eksternal parpol. Hambatan yang dihadapi selama kampanye seperti, rendahnya dukungan partai politik tidak semua tim sukses membantu pencalonan secara ikhlas, terdapat tim sukses yang memanfaatkan moment pemilu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melakukan manipulasi data atas perolehan suara politik kandidatnya, terdapat tim sukses yang rangkap jabatan (menjadi tim sukses pada caleg lain) dan selama berkampanye masyarakat banyak menuntut materi yang berlebihan.¹⁰

Skripsi dari Rasniati yang berjudul “*Strategi Pemenangan Pasangan Raden Adipati Sury dan Edward Antoni dalam Pemilukada Serentak 2015 di Way Kanan*” Skripsi ini berisi tentang strategi yang dilakukan oleh pasangan Raden Adipati Sury dan Edward Antoni dalam Pemilukada Serentak 2015 di Kabupaten Way Kanan yang pertama dilakukan adalah survey lapangan, melihat kondisi lapangan yang terjadi, mencari tahu kelemahan dan kekuatan lawan serta peluang yang bisa dimanfaatkan. Kedua, mengembang isu-isu yang ada, mengangkat isu-isu kelemahan lawan. Ketiga, pendekatan kepada masyarakat dengan terjun langsung, bertatap muka dengan masyarakat, sehingga benar-benar memahami yang menjadi keiginan masyarakat, keempat, menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kerjasama yang baik antar tim dan menjaga kesolidan tim.¹¹

¹⁰ Hendra Fauzi, *Strategi Politik Calon Legislatif Perempuan dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif 2009 (Studi pada Calon Legislatif Perempuan di Dapil 6, Kecamatan Natar Lampung Selatan)*, Skripsi Universitas Lampung (Bandar Lampung : 2010).

¹¹ Rasniati, *Strategi Pemenangan Pasangan Raden Adipati Sury dan Edward Antoni dalam Pemilukada Serentak 2015 di Way Kanan*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung (Lampung : 2016).

Skripsi dari Muhammad Ayub Liwang yang berjudul “Kekuatan dan Strategi Politik dalam Pilkada Analisis terhadap Kemenangan Adnan Purichta dalam Pilkada Kabupaten Gowa” Hasil penelitian skripsi ini adalah pengaruh kekuatan politik Adna Purichta sangatlah berpengaruh dalam pilkada Kabupaten Gowa bagaimana pemanfaatan birokrasi, partai politik, klan politik dan media yang dijadikan sebuah alat untuk menjalani proses pilkada, selain kekuatan politik yang bermain, bagaimana mengelola strategi yang tepat untuk memenangkan pilkada, adapun strategi politik yang digunakan yaitu, menentukan konsultan politik, dan strategi kampanye politik, pemanfaatan kekuatan politik dan strategi politik oleh Adna Purichta dalam Pilkada Gowa yang lalu terbukti ampuh ini dibuktikan dengan kemenangan Adnan Purichta dalam Pilkada Gowa dengan persentase suara 41,65 %.¹²

Skripsi dari Tarmijin yang berjudul “Strategi Kemenangan Partai Amanat Nasional (Study Terhadap Kemenangan PAN Pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Bima)” Hasil penelitian skripsi ini adalah Strategi Partai Amanat Nasional dalam memenangkan pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Bima sangatlah penting mengingat strategi tersebut merupakan kunci kemenangan PAN. Adapun bentuk strategi yang dilakukan oleh PAN adalah terletak pada strategi strategi internal dan strategi eksternal PAN itu sendiri. Kekuatan utama dalam tubuh PAN yakni terdapat pada pola rekrutmen partai yang lebih mementingkan figur dan pengalamannya, kemudian milintasi dan loyalitas kader atau mesin-mesin

¹² Muhammad Ayub Liwang, *Kekuatan dan Strategi Politik dalam Pilkada Analisis Terhadap Kemenangan Adnan Purichta dalam Pilkada di Kabupaten Gowa*, Skripsi UIN Alauddin Makassar (Makassar : 2016).

partai serta memanfaatkan kedekatan Muhammadiyah untuk menarik suara. Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemenangan PAN yakni terdapat pada sosialisasi untuk memperkenalkan partai dan calon, selanjutnya komunikasi langsung dengan masyarakat, serta tidak bisa dinafikan adanya pembagian sembako baik sebelum pemilihan maupun jauh hari sebelum itu.¹³

Berdasarkan kelima penelitian yang telah disebutkan diatas, semuanya memang merupakan penelitian yang membahas tentang strategi politik baik itu strategi organisasi (partai) maupun strategi individu (calon legislatif). Tetapi, kelima penelitian itu tidak sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena penelitian ini lebih berfokus untuk menganalisis strategi apa saja yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera sehingga populer di masyarakat Musi Banyuasin. Sehingga hal itu menjadi kelebihan tersendiri bagi penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategia*” yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratus* (tentara) dan *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai awal industrialisasi.¹⁴ Kemudian istilah strategi itu meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang

¹³ Tarmijin, *Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (Studi Terhadap Kemenangan PAN pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Bima)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar (Makassar : 2017).

¹⁴ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik : Paradigma, Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2013), hal. 235.

komunikasi, politik dan komunikasi politik. Hal tersebut penting dalam upaya memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik lainnya.

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum . strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara) yang maksimal di Pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada kemaslahatan rakyat

Strategi politik secara *offensive* menurut Robbins (2013:161) antara lain adalah sebagai berikut¹⁵:

1. *Planning mode* (model perencanaan) dimana dalam menyusun dan merencanakan sesuatu perlu mendetail langkah dan sasaran kedepan secara matang demi tercapainya suatu tujuan. Perencanaan yang dilakukan didasarkan pada kebutuhan yang hendak dicapai. Dalam konteks pemilihan legislatif maka yang harus dilihat oleh partai politik adalah perekrutan caleg yang akan diusung dan target sasarannya apakah kaum muda, apa kaum intelektual, atau kaum petani.
2. *Evolutionary mode* (model evolusioner) dimana dalam mencapai tujuan dibutuhkan proses yang berangsur secara perlahan. Perubahan-perubahan yang dilakukan mengikuti kebutuhan dan perkembangan

¹⁵ Sidarta GM, *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung*. (Jakarta : Kalam Indonesia, 2013). Hal 34.

lingkungan sehingga eksistensi keberadaannya akan bertahan di masyarakat.

Strategi *offensive* lainnya menurut A. Halim dimana dalam hal mencapai tujuannya (memperoleh kemenangan) sangat bergantung pada kemampuan dalam mempersiapkan amunisi yang dibutuhkan bagi menyerang para pesaing. Terutama berkenaan dengan kemampuan menggalang massa sesuai dengan peluang dan ancaman dari eksternal.¹⁶

Strategi secara *defensive* menurut Benoit antara lain adalah sebagai berikut¹⁷ :

1. *Denial* (Penolakan adalah reaksi alami terhadap sebuah tuduhan) makanya adalah seseorang atau organisasi dapat menyangkal bahwa tindakan itu terjadi atau menyangkal peran mereka dalam melakukan hal itu. Ada dua model *Denial* yaitu, Pertama *Simple Denial* penyangkalan sederhana seperti ucapan kami tidak melakukan hal ini. Kedua *Shifting the Blame* atau menyangkal perbuatan dan menggeser kesalahannya pada orang lain dengan mengatakan bukan kami, namun orang lain yang melakukannya.
2. *Evading Responsibility* (Menghindari tanggung jawab). Ketika seseorang tidak dapat menyangkal melakukan perbuatan, organisasi mungkin mencoba untuk menghindari dari perbuatannya sendiri. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai lepas tanggung jawab

¹⁶ <http://ejournal.ac.id> “Strategi Pemenangan Politik Pasangan Idza-Narjo” Vol.7, no.2 (2016).

¹⁷ Masduki, “Strategi Pemulihan Citra Partai Politik : Kasus Partai Demokrat “. Dalam Unisia, Vol.XXXVI no.8 1 Juli 2014

atau menghindari tanggung jawab terhadap tindakannya tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tanggung jawab pada tindakan yang dimaksud. Pada strategi ini *Benoit* mengelompokkannya menjadi beberapa varian yaitu, *Scapegoating* (pengkambinghitaman): aktor dapat mengklaim bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap tindakan salah yang lain. *Defeasibility*: aktor memohon kurangnya pengetahuan atau kontrol tentang faktor-faktor penting yang berhubungan dengan tindakan. *Ofensif*: pihak tertuduh melakukan kesalahan karena kekurangan informasi dan kompetensi.

3. *Reducing offensiveness* (mengurangi pertahanan). Seorang atau organisasi berusaha untuk mengurangi tingkat persepsi negatif di benak publik. Strategi ini memiliki beberapa komponen yaitu, *bolstering* mengurangi dampak negatif dengan cara menunjukkan ide positif. Seseorang atau organisasi mengingatkan publik atas perilaku baik yang pernah ia lakukan sebelumnya atau reputasi yang sebelumnya baik, mencoba meraih simpati publik dengan mengutip tindakan positif dimasa lalu, tanpa mengkaitkan dengan kesalahan yang telah diperbuat hari ini. Komponen selanjutnya adalah *Minimization* atau mengurangi opini buruk. Mencoba untuk meminimalisasi perasaan negatif terhadap hal yang terjadi dengan cara memberikan persuasi yang baik. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa hal yang terjadi tak seburuk seperti yang

dipikirkan. Aktor juga bias mengembangkan metode *Differentiation* (Perbandingan) perbuatan itu dibedakan dari tindakan lebih ofensif lain untuk mengurangi perasaan negatif membandingkan dua perilaku kontradiktif.

4. *Corrective Action* (Tindakan korektif). Janji bahwa aktor akan memperbaiki masalah untuk mengembalikan situasi ke kondisi sebelumnya atau menjanjikan untuk membuat perubahan untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Tindakan korektif adalah strategi pengembalian citra dimana pihak tertuduh berusaha untuk mengembalikan citranya dengan menjanjikan bahwa tindakan tersebut akan diperbaiki.

5. *Mortification* (Sikap bertanggung jawab dan mohon maaf). Organisasi atau seseorang secara berani dan terbuka mengakui, bertanggung jawab atas perbuatannya serta minta maaf.

Sedangkan strategi menurut Salusu merupakan suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi saling menguntungkan. Sedangkan menurut Mintzberg menjelaskan bahwa strategi adalah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tertentu didalam

suatu organisasi. Strategi dibagi menjadi dua yaitu strategi sebagai rencana dan strategi sebagai taktik.¹⁸

Strategi organisasi ini berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, nilai-nilai, inisiatif-inisiatif strategi yang pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

1. *Program Strategy* (Strategi Program). Strategi ini memberikan perhatian implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu, apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

2. *Resourch Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya). Strategi ini memusatkan perhatian kepada maksimalisasi pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, dan teknologi.

3. *Institutional Strategy* (Strategi Institusi). Fokus dari Strategi Institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis.

sebagai rencana adalah suatu program atau langkah rencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang ditentukan, sama halnya dengan

¹⁸ J. Salusu, *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah*. (Jakarta : Prenada Media, 1996).

konsep strategi sebagai taktik merupakan sebuah maneuver spesifik untuk mengelabui atau mengecoh kompetitor.¹⁹

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan atau Metode Penelitian

Tipe Penelitian berjudul analisis terhadap strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan legislatif di Kabupten Musi Banyuasin menggunakan penelitian dengan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar yang peneliti dapat di lapangan dengan cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.²⁰

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

¹⁹ Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. (Jakarta : Prenada Media, 2003), hal. 12.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hal.76.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Karena itu penelitian ini menjadi sumber data utama adalah masyarakat yang ikut berperan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin. Wawancara ini ditujukan kepada ketua DPD PKS Musi Banyuasin, Wkll Ketua DPD PKS Musi Banyuasin, Sekertaris DPD PKS Musi Banyuasin, Bendahara PKS Musi Banyuasin, beberapa Caleg PKS dan masyarakat Musi Banyuasin, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Narasumber Yang Diwawancarai Dalam Penelitian

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Status sosial
1	Amir Arifudin	42 Tahun	Wiraswasta	Sarjana	Ketua DPD PKS periode 2015-2020 (Caleg)
2	Ahmad Toha	53 Tahun	Wiraswasta	Sarjana	DPRD Terpilih
3	Zuraida	49 Tahun	Guru	Sarjana	Istri DPRD
4	Feri Setiawan	34 Tahun	Guru	Sarjana	Bendahara Umum DPD PKS periode 2010-2020 (Caleg)
5	Musheni	36 Tahun	Wiraswasta	Sarjana	Sekretaris Umum DPD PKS periode 2010-2020
6	Dwi Ahmad	39 Tahun	Wiraswasta	Sarjana	Staff ahli anggota dewan PKS Musi Banyuasin
7	Siswadi	45 Tahun	Tani	SMA/SLTA	Kepala Desa Linggo Sari

b. Data Sekunder

Data utama tentu membutuhkan data tambahan sebagai data pendukung dan pelengkap untuk kepentingan kevalidan data. Data-data tambahan tersebut diperoleh melalui sumber tertulis yang berupa buku, arsip, majalah ilmiah, dokumen dan lain sebagainya.

Dalam penelitian, sumber data skunder berupa hasil dari penghitungan KPU maupun *Quick Count* surat kabar ataupun pengumuman-pengumuman dan hal-hal yang menunjuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perolehan Suara pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan langsung, dengan disertai pencatatan hasil pengamatan terhadap keadaan atau perilaku objek yang menjadi sasaran penelitian.²¹ Metode ini digunakan penulis untuk melihat gejala-gejala yang Nampak tentang Strategi Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, wawancara ini digunakan untuk mengetahui secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.²² Metode ini digunakan penulis untuk menghimpun data tentang Strategi

²¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal. 70.

²² *Ibid*, hal. 74.

Partai Keadilan Sejahtera dalam Perolehan Suara Pileg di Kabupaten Musi Banyuasin.

c. Metode dokumentasi adalah metode mencari dan mendapatkan data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, prasasti, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²³ Metode ini digunakan penulis untuk menghimpun data tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Perolehan Suara pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dari penelitian ini adalah DPD PKS Musi Banyuasin. Alasan peneliti mengambil penelitian ini karena pada pemilihan legislatif tahun ini PKS mendapat dukungan lebih di mata masyarakat Musi Banyuasin yang meningkat drastis yaitu 100% suara, yang tadinya pada pemilihan legislatif 2014 PKS hanya mengantongi 15.625 suara, pada tahun 2019 ini PKS mendapat dukungan sebesar 30.321 suara.

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian hal terpenting adalah menganalisis data yang diperoleh di lapangan maupun dari sumber pendukung lain. Menurut Koentjaraningrat secara umum analisa data adalah tahap pengolahan data dan dimanfaatkan sedemikian

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet Ke-13. (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal. 231.

rupa, sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat tahapan dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dari beberapa informan yaitu meliputi pengurus DPD PKS Musi Banyuasin, tokoh masyarakat Musi Banyuasin serta data-data pendukung baik berupa buku-buku, artikel, maupun jurnal yang mendukung dalam fokus pembahasan penelitian ini.

b. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa agar dapat, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, untuk penyederhanaan. Selain itu reduksi data bertujuan untuk memberi gambaran dan pengamatan yang sekaligus untuk mempermudah kembali pencarian data yang diperoleh, yakni berkaitan dengan strategi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan dalam pembuatan yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan. Penyajian data cenderung pada penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dan dipahami.

²⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, hal. 269

Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data yang berkaitan dengan strategi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi ataupun telah disajikan. Tahap ini merupakan interpretasi peneliti, dimana peneliti menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau analisis suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan menyebabkan tidak terjadi salah pemaknaan dalam penyimpulan tersebut

Data-data yang sudah dikumpulkan melalui bagian bagian dari penelitian, akan menjawab dari pokok permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah hasil yang dari apa yang di dapatkan selama melakukan penelitian yang kemudian dirumuskan dan diambil kesimpulan dari permasalahan yang akan diteliti.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusun penelitian ini peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, pada Bab ini pertama akan diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, pada bab ini terdapat gambaran umum PKS Musi Banyuasin dan perolehan suara dalam pemilihan legislatif tahun 2019.

BAB III: Hasil dan Pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, meliputi analisis strategi PKS dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 dan kendala-kendala yang dihadapi PKS dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019.

BAB IV: Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran atas keseluruhan hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam yang memiliki perwakilan di Parlemen Indonesia. Partai ini berdiri pada 20 April 1998 yang berawal dari gerakan aktifitas dakwah Islam sejak 1980-an. Pemilu 2019 menjadi pertarungan kelima yang diikuti partai ini dalam Pemilihan Legislatif.

Kelahiran PKS erat kaitanya dengan gerakan Islam berbasis massa kampus dan cendekiawan yang muncul sebagai tanggapan atas tekanan politik pemerintah orde baru terhadap umat Islam. Gerakan ini ditandai dengan mulai maraknya kegiatan kajian Islam dan meluasnya penggunaan jilbab di kampus-kampus sekuler Indonesia pada era 1980-an.

Kurang dari satu tahun setelah pendiriannya dengan latar belakang pendirinya yang sebagian besar adalah intelektual-intelektual muda terdidik PKS berpartisipasi pada Pemilu pertama di era Reformasi. Pada Pemilu 1999, PKS memperoleh 1,4 juta suara yang menjadikan partai ini sebagai partai Islam terbesar kelima di Indonesia. PKS kemudian menjadi bagian Fraksi Reformasi bersama dengan PAN.²⁵

²⁵ Firman Noor, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di dekade awal reformasi.* (Jakarta : LIPI, 2015).

Dalam pemilu 2004, partai ini mendapat 7,3% dukungan suara nasional, melonjak dari perolehan suara pada pemilu sebelumnya yang hanya 1.36%. PKS meraup dukungan paling banyak di perkotaan. PKS menempatkan tokoh-tokoh muda sebagai kandidat alternatif untuk diusung sebagai gubernur, bupati dan wali kota melalui pemilihan kepada daerah secara langsung yang di gelar sejak 2005.

PKS tampil sebagai suara terbanyak keempat hasil pemilu 2009 seiring meluasnya sebaran pemilih PKS. Eskalasi kemenangan yang diraih PKS dalam pilkada serentak yang digelar sejak 2015 baik lewat jalan koalisi maupun mengusung kadernya sendiri telah mematahkan Dominasi Golkar dan PDI Perjuangan.

Partai ini secara rutin terlibat dalam program pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan bantuan kemanusiaan. Dengan sistem kaderisasi yang teratur PKS membangun militansi kadernya. Kader membiayai keterlibatan diri mereka dalam agenda politik dan tidak bergantung pada figur. PKS secara konsisten memberikan dukungan bagi perjuangan umat islam di seluruh dunia lewat lpbi di parlemen, demonstrasi, maupun penggalangan dana. Dalam setiap demonstrasi maupun kampanye mereka, PKS dianggap mendatangkan contoh mengarahkan massa dalam jumlah banyak dengan tertib dan aman.

Asal usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan perdana menteri Indonesia dan Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islam

Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya focus kepada usaha mencengahkan kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.

Pada 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadi pancasila sebagai asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh islamis berang dan menyebut rezim Soeharto telah memperlakukan politik islam sebagai suatu hambatan. Pada saat yang sama, jamaah tarbiyah meraih momentumnya dikalangan mahasiswa kader Rohis dan aktivis dakwah di kampus-kampus. Pada tahun 1993, Mustafa Kamal, seorang Kader jamaah Tarbiyah memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, kader jamaah pertama yang memegang kekuasaan di level Universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader jamaah Tarbiyah, menjadi ketua senat mahasiswa di Universitas yang sama.

Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-azhar, Kebayoran baru, Jakarta pada 20 Juli 1998, dan mengangkat Didin Hafidhuddin sebagai presiden pertamanya. Di pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK mendapat 1.436.565 suara, sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional dan mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa partai ini melakukan *stembus accord* dengan delapan partai politik berbasis Islam

lainnya pada Mei 1999. Pasca pemilu 1999, PK mengganti kepemimpinan partainya, dan menunjuk Nurmahmudi Ismail sebagai Presiden Partai ke-2.

Kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten dan Kota). Sehari kemudian, PK resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di Pemilu Legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8.325.020 suara, sekitar 7,34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat.

B. Visi dan Misi PKS di Musi Banyuasin

PKS sebagai partai dakwah akan berjuang secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun structural, dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya masyarakat madani dalam bingkai NKRI. Caranya dengan mempercepat realisasi target PKS dari “partai kader” menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh”, agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan, dan pedagang. Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif

seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan professional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang religius, sejahtera, aman, adil, berdaulat, dan bermanfaat.

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat bagi seorang *civil society*, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem yaitu mengurangi dan melebihi (*ifrath* dan *tafrith*).

Wujud konkret nilai-nilai keadilan pada aspek kemanusiaan adalah sikap “pertengahan” yang telah menjadi salah satu kekhususan Umat Islam dan telah menjadi karakteristik metodologi Islam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Para cendekiawan muslim melukiskan sikap itu dengan istilah moderasi, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem. Keseimbangan hidup merupakan buah dari kemampuan seseorang dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal dan jasad) secara mutlak. Itulah pangkal kesejahteraan dalam maknanya yang sejati. Kesejahteraan paripurna akan melahirkan kebahagiaan hakiki. Itulah sebabnya keseimbangan yang sempurna diantara kualitas-kualitas moral yang tampak bertentangan hanya mungkin diwujudkan dengan keadilan, sesuai dengan makna asasi keadilan adalah yang

berasal dari akar yang sama dengan kata keseimbangan (I'tidal). Oleh sebab itu, para ulama menegaskan nilai keadilan sebagai kebaikan yang paling sempurna.

Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut maka secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar juga secara fisik sejahtera. Sebagaimana Firman Allah SWT yang menegaskan, “Dan Allah sudah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat” (QS.An-nahl:112)

Sejahtera megarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah. Kesejahteraan tidak mencerminkan jumlah alat pemenuhan kebutuhan, tetapi keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal dan jasad). Kesejahteraan seperti itu yang akan melahirkan kebahagiaan hakiki bagi bangsa Indonesia.

Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya baik dalam aspek

sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa-bangsa luar. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreatifitas. Kreatifitas bangsa yang tinggi dapat berwujud dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak di dikte oleh bangsa lain.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, maka secara budaya dan agama, Islam dapat tampil memberikan model masyarakat yang bisa mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan pluralitas budaya lokal dan sekaligus aspirasi kemodernan dalam sebuah rumah besar bernama Indonesia. Hal itu menyaratkan pandangan keagamaan yang lebih menekankan aspek substansial yang universal dari pada simbolik, dan tumbuhnya sikap saling menghargai serta kearifan di kalangan masyarakat. Dalam kerangka itulah kita memandang dan menyikapi pluralitas kebudayaan hingga pada akhirnya dapatmemperkaya kebudayaan nasional menjadi satu system yang idah, efektif dan saling bersinergi. Pluralitas sebagai karunia Tuhan, baik itu terkait dengan ras, budaya maupun profesi, seharusnya dilihat sebagaisuatu kekayaan yang patut dikelola dengan penuh keadilan bagi bangsa yang bermartabat.

Semua itu adalah kondisi yang dicita-citakan sekaligus, kondisi kehidupan berdakwah yang diharapkan, yang bermuara pada terjaminnya manusia dalam memenuhi lima kebutuhan primer hidupnya, yakni perlindungan atas agama, jiwa,

akal, harta, dan keturunan. Itulah masyarakat Indonesia yang religious, masyarakat yang madani, yang seluruh komponen bekerjasama dalam kebaikan, tolong-menolong dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan keimanan. Masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat, yang melindungi warganya , mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut menjaga ketertiban dunia. Suatu masyarakat dan bangsa yng dapat berdampingan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat dengan khas takwa. Indonesia yang kita citakan adalah masyarakat yang hidup dengan penuh kasih sayang, yangmuda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda, laki-laki bahu menbahu dengan perempuan, dalam pluralitas kebudayaan.

Masyarakat madani merupakan model masyarakat berkeadilan, tatkala keragaman menjadi sumber dinamika bangsa. Para kritikus kreatif konstruktif memenuhi parlemen, kaum profesional mengisi kabinet, dan orang-orang bijak pemberani yang menjaga benteng peradilan. Para pengusaha menjadi berkah bagi negara dan rakyat, demikian pula para ulama dan umaro', cendikiawan dan budayawan berdiri di garda depan peradapan bangsa prajurit dan perwira TNI dan Polri menjadi pengawal negara dan penjaga keamanan yang profesional, sebuah kekuatan yang menyebarkan rasa aman dihati rakyat tanpa harus kehilangan hak-hak politikyang wajar sebagai warga negara. Kalangan perempuan menjadi saudara kaum lelaki, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya, dan bekerjasama secara setara bagi kemajuan bangsa. Kaum muda mempunyai peran strategis sebagai pelopor peradaban untuk perbaikan. Setiap kelompok mengembangkan budaya demokrasi produktif, berinteraksi

secara positif dengan semangat kebersamaan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Misi yang diemban oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut :

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi, mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian dan intelektualitas,
2. Menuntaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktivitas pertanian, kehutanan dan kelautan, peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan upgrading kemampuan teknologi, dan pembangunan sector-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis resources dan knowledge. Semua itu di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara pemilik modal dan pelaku usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli dan segala bentuk

kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera.

Sedangkan visi-misi PKS Musi Banyuasin yaitu²⁶; F-PKS Musi Banyuasin sebagai etalase organisasi partai politik mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam mengimplementasi visi dan misi partai di lembaga formal pemerintah dan masyarakat. PKS mempunyai visi yakni “menjadi partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk umat, bangsa dan Negara”.

Misi PKS Musi Banyuasin :

1. Memperkokoh jati diri partai kader yang berkarakter bersih, peduli dan professional.
2. Memperkokoh *Good Party Governence* melalui sistem Managemen Partai Dakwah.
3. Menjadikan PKS sebagai pelopor dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan rakyat.
4. PKS menjadi kontributor peradaban.

²⁶ Sekertaris PKS Musi Banyuasin.

Berdasarkan penjelasan misi Partai Keadilan Sejahtera diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera di Musi Banyuasin juga memiliki misi yang sama dengan yang dijelaskan di atas. Tetapi disini Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin ini lebih memfokuskan pada mutu masyarakat Musi Banyuasin itu sendiri seperti peningkatan kehidupan yang layak, dalam hal ini masyarakat dapat dengan mudah mencari pekerjaan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan kualiatas pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, masyarakat Musi Banyuasin dapat dengan mudah bersekolah dan berobat jika ada masyarakat yang sakit.

C. **Kepemimpinan PKS di Musi Banyuasin**

Dalam perjalanannya, PKS sering sekali mengalami gejolak kepemimpinan yang silih berganti. Periode kepemimpinannya pun sangat beragam, ada yang sangat singkat ada juga yang hingga akhir masa jabatan yaitu selama 5 tahun. Adapun berikut ini adalah orang yang menjabat Presiden PKS Nasional sejak tahun 1998-2019 (sekarang) :

Tabel 1.2

Daftar Kepemimpinan PKS sejak berdiri hingga saat ini

No	Nama	Dari	Sampai	Keterangan
1	Didin Hafidhuddin	20 Juli 1998	9 Juli 1999	Guru Besar Agama Islam Institut Pertanian
2	Nurmahmudi Ismail	9 Agustus 1999	16 April 2000	Ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional

3	Hidayat Nur Wahid	21 Mei 2000	11 Oktober 2004	Terpilih sebagai Ketua MPR
4	Tifatul Sembiring	11 Oktober 2004	23 Oktober 2009	Ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Bersatu II
5	Luthfi Hasan Ishaq	23 Oktober 2009	20 Juni 2010	Pejabat Presiden 2009-2010
		20 Juni 2010	1 Februari 2013	Mengundurkan diri karena ditetapkan tersangka oleh KPK
6	Anis Matta	1 Februari 2013	10 Agustus 2015	-
7	Sohibul Iman	10 Agustus 2015	Pertahana 2020	-

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan <http://pks.id/content/sejarah-singkat>.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwasannya petinggi-petinggi PKS tidak hanya memiliki jabatan tertinggi dalam partai, namun juga mereka semua kebanyakan memiliki kedudukan yang tinggi di instisusi-institusi pemerintahan baik dalam institusi pendidikan maupun dalam kabinet kerja kepresidenan.

Adapun berikut tabel kepemimpinan dan perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin sejak tahun 1998-2019 (sekarang)²⁷ :

²⁷ Wawancara dengan Bapak Slamet Mugiono, Dewan Pembina PKS Musi Banyuasin, Sejarah kepengurusan DPD PKS Musi Banyuasin dan perolehan kursi pada tiap-tiap Pemilu, Pada Tanggal 7 Desember 2019.

Tabel 1.3
Daftar Kepemimpinan PKS Musi Banyuasin dan perolehan kursi
pada tiap Pemilu

No	Nama	Periode	Jumlah Perolehan Kursi Pada tiap Pemilu
1	Slamet Mugiono	1998-1999	Pemilu 1999 mendapat 1 kursi
2	Masrur Musir	1999-2004	Pemilu 2004 mendapat 1 kursi
3	Nur Yasin Azim	2004-2009	Pemilu 2009 mendapat 2 kursi
4	Dear Fauzul Azim	2009-2014	Pemilu 2014 mendapat 3 kursi
5	Amir Arifudin	2014-2019	Pemilu 2019 mendapat 4 kursi dan 1 kursi untuk provinsi

Sumber : Diolah peneliti berdasarkan Wawancara dengan bapak Drs. Slamet Mugiono

Berdasarkan tabel diatas , dapat dilihat bahwasannya hasil perolehan suara pada tiap Pemilu sangat fluktuatif yang lebih cenderung mengalami kenaikan. Masyarakat Musi Banyuasin sangat mempercayai PKS sebagai suatu Partai yang memberikan kontribusi dalam mensejahterakan dan mendengarkan aspirasi masyarakat Musi Banyuasin, terlebih pada tahun 2019 PKS sudah menjadi salah satu partai besar yang mendapatkan kursi untuk duduk di DPR kabupaten maupun DPR provinsi.

D. Sistem Kaderisasi PKS di Musi Banyuasin

Seleksi dan pola Rekrutmen kader PKS unik dimana Kader PKS dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh sekelompok individu dan atau oleh *murabbi* (guru pembimbing) menggunakan metode tarbiyah (pendidikan). Berkesinambungan dan terjadwal (halaqah). PKS memakai

dua strategi dalam merekrut kader. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual (*al-dawah al-fardhiyyah*), atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisasi PKS seperti *usrah* (keluarga), *halaqah* (sekelompok studi), *liqa* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukhayyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual), dan *nadwah* (seminar). Sistem yang digunakan PKS ini mirip dengan sistem rekrutmen gerakan islamis di Mesir. Yang kedua adalah pola rekrutmen institusional (*al-dawah al-amamah*) PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat mencari individu potensial untuk dijadikan kader partai.

PKS mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pelatihan hierarkis yang disebut marhalah. Pelatihan ini mencakup proses pembelajaran (*talim*), pelatihan keorganisasian (*tandzim*), pembinaan karakter (*taqwin*), dan evaluasi (*taqwim*). Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS, kader harus mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat. Dengan demikian, sistem sumpah ini tidak memungkinkan non muslim menjadi kader PKS. Namun sesuai hasil Munas 2010 di Jakarta, PKS membedakan antar kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah pasti seorang muslim. Sementara anggota adalah siapa saja yang terikat kepada organisasi dan bersifat lebih umum dan terbuka.

Dalam kaderisasi PKS kader dibedakan atas dua, yaitu; kader inti dan kader biasa. Kader inti ialah kader yang sudah lama terbina dan pemahaman

terhadap visi misi PKS sudah baik, sedangkan kader biasa ialah kader yang belum lama terbina dan pemahaman terhadap visi misi PKS masih dalam proses belajar. Saat ini jumlah kader PKS Musi Banyuasin yang aktif terdapat 468 yang terdiri dari 86 kader inti dan 372 kader biasa. Kader-kader tersebut masuk dalam inti struktural PKS Musi Banyuasin, yaitu dalam Badan Pengurus Harian (BPH), mulai dari BPH yang ada di Sekayu yaitu DPD PKS yang terdiri dari 5 orang pengurus (ketua, sekretaris, bendahara, kewanitaan, dan kaderisasi), yang membawahi BPH yang ada di tiap-tiap kecamatan biasa disebut DPC yang terdiri dari 5 orang pengurus (ketua, sekretaris, bendahara, kewanitaan, dan kaderisasi), yang membawahi BPH yang ada di tiap-tiap desa (bagi yang ada) biasa disebut DPRa yang terdiri dari 3 orang pengurus (ketua, kewanitaan dan kaderisasi).²⁸

E. Perolehan Suara PKS di Musi Banyuasin

Dalam perjalanan selama mengikuti kontestasi Pemilu PKS mendapatkan dukungan dari masyarakat luas secara beragam, antar tiap Pemilu perolehan suara

²⁸ Hasil wawancara dengan informan Bapak Dwi Ahmad (Staff ahli anggota dewan PKS) yang dilakukan pada tanggal 25 November 2019 di Desa Sri Gunung.

PKS sangat fluktuatif. Berikut ini adalah perolehan suara PKS dalam tiap-tiap pelaksanaan pemilihan umum secara Nasional²⁹ :

Tabel 1.4
Perolehan suara PKS pada tiap Pemilu tingkat Nasional

Pemilu	Total Kursi	Total Pemilihan	%	Hasil	Urutan
1999	7/462	1.436.565	1,36	Partai Baru	7
2004	45/550	8.325.020	7,34	38 kursi	6
2009	57/560	8.204.946	7,88	12 kursi	4
2014	40/560	8.480.204	6,79	17 kursi	7
2019	50/575	11.493.663	8,21	10 kursi	6

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan <http://pks.id/content/sejarah-ringkas>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera dalam setiap pemilu sangat dinamis dan relatif mengalami kenaikan. Walaupun demikian, seluruh rakyat Indonesia khususnya Musi Banyuasin telah menaruh simpati yang lebih pada partai ini. Mereka menilai bahwa Partai Keadilan Sejahtera ini dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Adapun berikut perolehan suara PKS di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya³⁰:

²⁹<http://pks.id/content/sejarah-ringkas>, diakses pada tanggal 3 Desember 2019.

Tabel 1.5
Jumlah Daftar Pemilih (DPT+DPPH+DPTB) Pemilu
Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019

No	Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	DPT	237.450	229.459	464.909
2	DPPH	416	175	441
3	DPTB	1.792	1.548	3.040
Jumlah		239.558	231.182	470.730

Sumber: diolah peneliti dari Data KPUD Musi Banyuasin 2019.

Tabel 1.6
Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilu Musi Banyuain 2019

No	Pengguna Hak Pilih	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	DPT	161.840	172.986	334.826
2	DPPH	316	125	441
3	DPTB	1.552	1.439	2.991
Jumlah		163.708	174.550	338.258

Sumber: Diolah peneliti dari Data KPUD Musi Banyuasin 2019.

Tabel 1.7
Jumlah perolehan suara PKS Musi Banyuasin pada Pemilu 2019

Perolehan suara PKS Musi Banyuasin per-dapil beserta caleg terpilih.			
Dapil I	Dapil II	Dapil III	Dapil IV
6.133 (Abdul Basit)	9.825 (M. Amin)	6.205 (Iwan Aldes, S.Sos, M. Si)	8.068 (Martinus)
Total perolehan suara PKS : 30.321			

Sumber : diolah peneliti dari Sekertaris DPD PKS Musi Banyuasin.

Dari tabel diatas dapat dilihat perolehan suara yang memilih PKS berjumlah 30.321 suara dari total pemilih 338. 258 pemilih, sehingga dapat dikalkulasikan **jumlah pemilih PKS (30.321) x 100% : Total pemilih Musi Banyuasin (338.258) = 8,9%**. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa

³⁰ KPUD Musi Banyuasin tahun 2019.

PKS merupakan salah satu partai politik yang cukup digandrungi di Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa informan dari internal maupun partisipan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Musi Banyuasin. Informan tersebut terdiri dari kalangan masyarakat biasa, tokoh masyarakat hingga pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Musi Banyuasin.

Data yang akan disajikan adalah data berupa wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti guna menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan dibahas yaitu: *pertama*: permasalahan mengenai bagaimana strategi politik Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019, dan yang *kedua*: permasalahan tentang apa kendala-kendala yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019.

A. Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pileg (Pemilihan Legislatif) di Kabupaten Musi Banyuasin Pada Tahun 2019

Pemilihan Legislatif sebuah proses untuk mencapai kebebasan berdemokrasi dalam menentukan calon wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Masyarakat atau rakyat dapat memilih langsung calon figur yang mereka senangi sedangkan figur yang dipilih tersebut adalah sosok yang mendapat apresiasi dari partai yang mengusung mereka. Sehingga, tak jarang elektabilitas partai yang mengusung tersebut juga mempengaruhi perolehan suara dari calon wakil rakyat tersebut. Semakin baik citra partai yang mengusung calon wakil

rakyat tersebut maka semakin baik pula perolehan suara wakil rakyat tersebut sebab apabila partai tersebut sudah tidak diminati masyarakat maka partisipasi masyarakat untuk memilih menjadi berkurang atau bahkan tidak bisa mendongkrak hasil suara wakil rakyat tersebut.

Pemilihan Legislatif sekarang ini telah membuat masyarakat menjadi sangat kritis dalam memilihnya, tak jarang banyak kriteria yang ditetapkan masyarakat dalam memilih salah satunya adalah wakil rakyat atau calon wakil rakyat tersebut dapat menyuarakan aspirasi dari masyarakat dan dapat membawa masyarakat kearah yang lebih baik mulai dari pembangunan secara fisik maupun sumber daya manusia. Itulah yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Sehingga, apabila calon wakil rakyat tersebut tidak memiliki kriteria tersebut, maka masyarakat dapat dipastikan tidak memilih mereka. Sehingga, bagi partai politik dan wakil rakyat tersebut harus dapat menarik simpati masyarakat pada saat kampanye karena sejatinya masyarakat itu dapat menilai layak atau tidaknya calon wakil rakyat tersebut melalui kampanye yang dilakukanya bersama partai politik yang mengusung mereka.

Salah satu tahapan dari Pemilihan Legislatif yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relation*, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses Pemilu juga sebuah kompetisi pada Pemilihan Legislatif yang memiliki pengaruh terhadap hasil Pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencitraan dalam

rangka untuk memperoleh dukungan serta mensukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara diperbolehkan bagi tiap Partai Politik beserta para Calegnya melakukan kampanye, sepanjang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Komisi-komisi penyelenggara di bawahnya. Itulah pelaksanaan yang telah disepakati dalam sopan santun politik.³¹

Strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategia*" yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratus* (tentara) dan *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai awal industrialisasi.³² Kemudian istilah strategi itu meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi, politik dan komunikasi politik. Hal tersebut penting dalam upaya memenangkan kompetisi dalam Pemilihan Umum dan pengambilan keputusan politik lainnya.

Strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau langkah rencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang ditentukan, sama halnya dengan konsep strategi perencanaan. Sedangkan pengertian strategi sebagai taktik

³¹ Roem Topatimasang, *Opcit*, hlm. 92.

³² Anwar Arifin, *Opcit*, hlm. 235.

merupakan sebuah maneuver spesifik untuk mengelabui atau mengecoh kompetitor.³³

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat Pemilihan Umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye dengan tujuan memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara) yang maksimal di Pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat.

Promosi dapat dijabarkan dalam tiga jenis yaitu, *advertising*, publikasi dan event debat. Harga digolongkan dalam tiga hal yaitu, harga ekonomi, harga psikologis, harga *image* (citra) nasional. Caleg Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi dan RI melakukan kampanye secara bersama-sama. Caleg Partai Keadilan Sejahtera menggunakan jaringan sosial, jaringan media, jaringan keagamaan, jaringan kekerabatan, melakukan pendekatan emosional dengan para tokoh politik. Hal itu dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin untuk memilih caleg-caleg yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga, pada akhirnya yang diharapkan adalah Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif pada tahun 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin.

³³ Winardi, Opcit, hlm. 12.

Dengan komitmen yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera beserta para calegnya, PKS mendapat kepercayaan lebih di masyarakat Musi Banyuasin dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 kemaren. Cerminan kepercayaan terhadap PKS dapat dilihat dari hasil Pemilu 2019 yang memperoleh dukungan dengan peningkatan 100% suara. Bila Pemilu 2014 PKS kabupaten Musi Banyuasin memperoleh suara 15.625 suara dengan perolehan kursi sebanyak 3 kursi, maka pada Pemilu 2019 PKS Musi Banyuasin memperoleh suara sebesar 30.321 suara dengan perolehan kursi sebanyak 4 kursi. Demikian pula dengan suara PKS di dapil IX Provinsi (Musi Banyuasin), dari perolehan suara 11.000 suara pada Pemilu 2014 menjadi 26.000 suara pada Pemilu 2019 dengan perolehan 1 kursi. Kenaikan dukungan atau pemilih PKS pada tahun 2019 memang mempunyai banyak faktor, akan tetapi peran dan fungsi FPKS pada periode 2014-2019 yang lalu juga mempunyai kontribusi.³⁴

Adapun strategi PKS secara *offensive* di Kabupaten Musi Banyuasin adalah: *Pertama*, pemetaan politik, melihat kondisi lapangan yang terjadi, mencari tahu kelemahan dan kekuatan pesaing sesama partai politik serta peluang yang bisa dimanfaatkan. *Kedua*, mengembangkan isu-isu yang ada, mengangkat isu-isu kelemahan lawan. *Ketiga*, pendekatan kepada masyarakat tokoh masyarakat dengan terjun langsung dan merekrutnya menjadi caleg yang akan diusung partai PKS (alhasil sukses merekrut Bapak Martinus seorang mantan preman dan Bapak Ahmad Toha seorang mantan calon wakil Bupati Musi Banyuasin 2017 serta menjadikan mereka duduk di kursi DPRD). *Keempat*, bertatap muka dengan

³⁴ Musheni, *Artikel : Ayo lebih Baik!* (Sekertaris Umum DPD PKS Musi Banyuasin).

masyarakat, sehingga benar-benar memahami yang menjadi keinginan masyarakat. *Kelima*, menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kerjasama yang baik antar tim dan menjaga kesolidan tim. *Keenam*, menjaring kader-kader dari berbagai macam kalangan baik itu kaum milenial, kaum intelektual, kaum pekerja dan tidak mempertahankan sifat eksklusif hanya sebagai partai kader.

Kekuatan politik Partai Keadilan Sejahtera sangatlah berpengaruh dalam pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin, bagaimana pemanfaatan birokrasi, Partai politik, klan politik dan media yang dijadikan sebuah alat untuk menajalani proses pemilihan legislatif, selain kekuatan politik yang bermain, bagaimana mengelola strategi yang tepat untuk memenangkan pemilihan legislatif, adapun strategi yang digunakan yaitu menentukan konsultan politik dan strategi kampanye politik, pemanfaatan kekuatan politik dan strategi politik.

Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin sangatlah penting mengingat strategi tersebut merupakan kunci kemenangan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun bentuk strategi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah terletak pada strategi internal dan strategi eksternal Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri. Kekuatan utama dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera yakni terdapat pada pola rekrutmen partai yang lebih mementingkan figur dan pengalamannya, kemudian militansi dan loyalitas kader atau mesin-mesin politik partai serta memanfaatkan kedekatan dengan kelompok pemuda atau mahasiswa untuk menarik suara.

Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemenangan Partai Keadilan Sejahtera yakni terdapat pada sosialisasi untuk memperkenalkan Partai dan Caleg, selanjutnya komunikasi langsung dengan masyarakat serta tidak bisa dinafikan adanya gratifikasi dengan cara memberikan buah tangan kepada masyarakat baik jauh-jauh hari maupun sebelum pencoblosan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan masyarakat menyebutkan bahwa dalam mencalonkan Calon Legislatif, Partai Keadilan Sejahtera selektif dalam mempertimbangkan dan memilih figur politik yang akan dimajukan dalam pertarungan di Pemilihan Legislatif 2019 dengan memilih kader-kader terbaik mereka dalam meyukseskan Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena kader-kader tersebut harus mampu membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar untuk menawarkan program serta terobosan yang ditawarkan partai pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin.

Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Linggo Sari, Kecamatan sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin

“hal yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah memilih kader-kader yang baik di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan melakukan hal itu maka Partai Keadilan Sejahtera dapat meningkatkan jumlah suara di Kabupaten Musi Banyuasin. Masyarakat Musi Banyuasin sudah sangat kecewa dengan kader-kader dari partai lain yang hanya mementingkan dirinya dan

*golongannya saja. Oleh karena itu, dia berharap supaya Partai Keadilan Sejahtera dapat merekrut kader-kader yang baik di kabupaten Musi Banyuasin agar mampu selalu hadir ditengah-tengah masyarakat yang mampu mendorong apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan rakyat”.*³⁵

Menurut peneliti, pendapat dari bapak Siswadi sangat tepat dijadikan salah satu strategi bagi Partai Keadilan Sejahtera karena dengan memilih dan menyeleksi kader-kader baik yang lebih dapat berkontribusi dan berkhidmat untuk rakyat akan merubah stigma dan citra partai dalam kaca mata masyarakat Musi Banyuasin yang selama ini menganggap politik itu hanya seputar jabatan yang di lelang dalam suatu kompetisi setiap lima tahun sekali yaitu pada saat Pemilu saja, sehingga banyak caleg dari berbagai partai yang lupa dengan janji kampanyenya yang apabila mereka terpilih hanya mementingkan kepentingan dirinya dan golongannya saja, sehingga strategi ini dapat merestorasi pandangan masyarakat tersebut dan menjadikan PKS merupakan partai yang populer dan diminati oleh masyarakat Musi Banyuasin.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Wakil Ketua DPD PKS Musi Banyuasin menyebutkan bahwa masyarakat cenderung rasional dalam memilih para caleg yang diusung oleh partai politiknya, karena masyarakat takut apabila sistem kinerja dari caleg yang akan terpilih memiliki sistem kinerja yang sama seperti caleg yang telah terpilih sebelum-sebelumnya yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan hanya

³⁵ Hasil wawancara dengan informan Bapak Siswadi (seorang Kepala Desa) yang dilakukan pada tanggal 25 November 2019 di Desa Linggo Sari.

mementingkan kepentingan dari golongannya saja. Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera harus mampu meyakinkan masyarakat Musi Banyuasin dengan menghadirkan calon-calon terbaik yang diambil dari para tokoh masyarakat yang nantinya akan mewujudkan janji-janji kampanyenya dengan mengedepankan asas keadilan dalam mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan wakil ketua DPD PKS Musi Banyuasin yang ada di Kelurahan Mekar Jadi, Kecamatan sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin

“hal yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera di kabupaten Musi Banyuasin adalah merekrut para caleg dari tokoh masyarakat. Dengan merekrut tokoh masyarakat sebagai caleg dari Partai Keadilan Sejahtera, hal itu dapat mempermudah Partai Keadilan Sejahtera untuk memenangkan pemilu tahun 2019 khususnya pemilihan legislatif. Tokoh masyarakat itu pada dasarnya adalah orang yang sangat berpengaruh di sebuah daerah dan memiliki massa atau pendukung yang banyak karena orang banyak mengenal dan mempercayainya. Sehingga, dengan kepopuleran dari tokoh masyarakat tersebut diharapkan dapat menarik simpati dari masyarakat untuk memilih caleg dari Partai Keadilan Sejahtera.”³⁶

Jadi berdasarkan wawancara dengan wakil ketua DPD PKS dapat disimpulkan bahwa adanya tokoh masyarakat dapat membuat pengaruh yang cukup besar bagi Partai PKS untuk memenangkan partai tersebut dalam pemilihan legislatif tahun 2019, karena dengan adanya kepopuleran tokoh masyarakat bisa

³⁶ Hasil wawancara dengan informan Bapak Lutfi Amirudin (Wakil Ketua DPD PKS Musi Banyuasin) yang dilakukan pada tanggal 26 November 2019 di Desa Mekar Jadi.

menarik simpati masyarakat dan meningkatkan suara Caleg dari Partai Keadilan Sejahtera. Terbukti dengan menggaet tokoh masyarakat seperti Bapak Ahmad Toha, S.Pd.i (Calon Wakil Bupati Musi Banyuasin 2017), Bapak Martunis (Tokoh Masyarakat Babat Supat), H. Bunyamin (Tokoh Masyarakat Plakat Tinggi) sebagai Caleg dari PKS dapat mendongkrak suara Partai yang cukup signifikan sehingga PKS mendapat penambahan 1 kursi tingkat Provinsi dapil Musi Banyuasin yang tadinya tidak dipercaya untuk duduk di DPR provinsi pada Pemilihan Legislatif 2014 menjadi mendapat kepercayaan untuk duduk di DPR provinsi pada Pemilihan legislatif 2019 sedangkan ditingkat kabupaten PKS juga mendapat tambahan 1 kursi lagi pada Pemilihan Legislatif 2019 menjadi 4 kursi dari yang sebelumnya hanya memperoleh 3 kursi Pada Pemilihan Legislatif tahun 2014, jadi total perolehan kursi PKS Musi Banyuasin 5 kursi yang terdiri dari 1 kursi DPR provinsi dan 4 kursi DPR kabupaten.



Gambar 1.1
Wawancara dengan bapak Lutfi Amirudin (Wakil DPD PKS Musi
Banyuasin).

Dari penjelasan tersebut bahwa salah satu strategi yang sangat efektif dalam mendongkrak suara dan popularitas PKS adalah merekrut para caleg dari tokoh masyarakat. Dimana para tokoh masyarakat tersebut memiliki dukungan dan jaringan yang kuat di masyarakat. Sebagaimana yang telah peneliti dapat dari Sekretaris Umum Fraksi PKS Musi Banyuasin dalam Artikelnya³⁷ :

Strategi *Offensive* PKS dengan menggandeng tokoh masyarakat

³⁷ Artikel sekretaris PKS Musi Banyuasin yang didapat via whatsapp.

Urutan hasil suara masing-masing caleg PKS untuk provinsi dimulai dari suara Ahmad Toha, S.Pd.i meraih suara terbanyak yakni 8.576 suara kemudian disusul suara terbanyak kedua Ir. Amir Husin sebanyak 5.962 suara. Secara berturut-turut ranking ketiga dan seterusnya Ishar dengan suara 2.787 suara, Azahari, S.Pd sebanyak 2.296 suara, Utami Fransiska, S.Pd sebanyak 1.476 suara dan I.M Fatimah, M.Pd meraih 940 suara. Salah satu faktor yang paling menonjol terdongkraknya suara PKS tingkat provinsi ini;

Secara ketokohan sebagai Mantan Calon Wakil Bupati Musi Banyuasin pada tahun 2017 yakni Ahmad Toha, S.Pd.i, dimulai dari keaktifan beliau sebagai Sekertaris Presidium DOB Muba Timur, Ahmad Toha terus berkomunikasi dengan elit-elit politik daerah hingga akhirnya berpasangan dengan Amiri Arifin sebagai calon bupati dan calon wakil bupati jalur independen. Ahmad Toha yang rela melepaskan posisi ASN di Kementerian Departemen Agama Republik Indonesia dengan semangat menjalani kampanye, silaturahmi ke masyarakat hingga perolehan suara Amiri-Toha mendapatkan suara sebesar 27% atau sekitar 65.000 suara. Modal jaringan dan modal politik inilah yang kemudian beliau lanjutkan untuk berkiprah politik praktis pada Pemilihan Legislatif 2019 melalui PKS sebagai calon DPRD Provinsi Sumsel dapil IX (Musi Banyuasin).

Selain Ahmad Toha, yang memiliki ketokohan kuat sebagai calon anggota DPRD PKS yang menunjang suara PKS Provinsi Ir. Amir Husin yang duduk sebagai anggota DPRD Muba 2009-2014 dan 2014-2019 tentu saja mempunyai jaringan yang cukup kuat dan pendukung militan yang berbasis di daerah Kecamatan Sungai Lilin dan merata di berbagai kecamatan lainnya. Hadir juga

Azahari yang berasal dari kecamatan Sanga Desa aktif bersosialisasi kepada anak-anak muda dan mempromosikan dirinya di media sosial. Berbeda dengan Ishar yang berangkat dari Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sungai Angit kecamatan Babat Toman mampu meraih suara terbanyak ketiga berkat memperkuat jaringan loyalisnya. Tidak lepas pula, sosok srikandi caleg PKS yakni Utami Fransiska dan I.M Fatimah yang ikut serta berkontribusi dalam pendulangan suara PKS terutama dibasis Sekayu dan sekitarnya.

Dari berbagai tokoh yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, masing-masing Calon Anggota DPRD Sumsel Dapil IX dari PKS tersebut adalah keterkenalan Ahmad Toha lah yang cukup memiliki nilai politis yang cukup tinggi sebagai mantan calon Wakil Bupati Muba tahun 2017 silam. Ada ketertarikan masyarakat terhadap figur Ahmad Toha yang berani tampil sebagai Calon Wakil Bupati Muba tahun 2017 dengan membawa isu-isu perubahan yang ditawarkan. Terlebih lagi, pada waktu Pilkada 2017 lawan tanding Amiri-Toha adalah H. Dodi-Beni yang didukung oleh 11 partai politik. Nilai politis ini merupakan investasi politis yang cukup positif dalam memperkuat figur Ahmad Toha. Terlebih lagi, beliau juga merupakan sosok yang aktif sebagai Ustad (guru) di Pondok Pesantren terbesar yang ada di Musi Banyuasin yakni Ponpes Assalam di Desa Srigunung. Alumni dan santri Ponpes Assalam yang tersebar di berbagai desa dalam Musi Banyuasin ikut membantu perolehan suara Ahmad Toha. Ahmad Toha juga mendapatkan profit politik dari caleg kabupaten seperti suara Ahmad Toha di kecamatan Plakat Tinggi yang diderek dari suara caleg kabupaten dengan nomor urut 1 yakni H. Bunyamin. Ahmad Toha juga mendapatkan support moral

dari masyarakat Plakat Tinggi karna nama beliau juga mirip dengan salah satu anak tokoh nahdatul ulama (NU) kabupaten Musi Banyuasin yang ada di kecamatan Plakat Tinggi yakni almarhum KH. Marzuki. Masyarakat Plakat Tinggi mengenal Ahmad Toha sebagai putra alarhum KH. Marzuki. Walaupun Ahmad Toha bukan anak kandung KH. Marzuki, tetapi secara ideologi beliau mempunyai kesamaan dalam perjuangan untuk umat dan Islam .

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Ibu Zuraida masyarakat Musi Banyuasin mengenai strategi Partai Keadilan Sejahtera peneliti juga menemukan adanya strategi lain seperti berkunjung ke rumah masyarakat (*door to door*). Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibu Zuraida

“Pada Pemilihan legislatif 2019 kemaren, Partai Keadilan Sejahtera itu mendengarkan keluhan dari masyarakat Musi Banyuasin mengenai berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Tidak bisa dinafikkan sistem door to door itu juga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera supaya dapat mengetahui langsung apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Musi Banyuasin guna meningkatkan taraf hidup mereka atau dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang memerlukan bantuan. Dengan kata lain, Partai Keadilan Sejahtera selalu hadir sepanjang waktu. Ketika Partai Keadilan Sejahtera melakukan hal ini maka diharapkan Partai Keadilan Sejahtera akan lebih menarik simpati di hati masyarakat Musi Banyuasin. Sehingga akan berdampak pada kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam

*pertarungan pada pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019”.*³⁸

Dengan mendengarkan langsung keluhan kesah masyarakat dan menjalin kedekatan emosional secara langsung ataupun *door to door* diharapkan para Caleg dari PKS dapat menampung aspirasi masyarakat dan memberikan solusi secara proporsional dengan keadaan masyarakat Musi Banyuasin. Sehingga, permasalahan yang ada ditengah masyarakat Musi Banyuasin dapat terselesaikan dengan baik.

Selain mendengarkan langsung keluhan kesah masyarakat Musi Banyuasin, strategi *offensive* PKS lainnya adalah dengan melakukan komitmen yang dijanjikan para caleg PKS terpilih kepada masyarakat yang apabila menjadi Anggota DPRD memiliki enam komitmen yang akan menjadi landasan dalam menjalankan peran dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat Musi Banyuasin, yakni:³⁹

1. Senantiasa menjaga integritas dan kinerja untuk mensejahterakan umat serta akan terus menjunjung tinggi prinsip, akhlak serta jati diri kader PKS yang bersih, peduli dan professional.
2. Menjalankan visi misi, falsafah perjuangan dan platform pembangunan PKS dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan sungguh-sungguh. Akan

³⁸ Hasil wawancara dengan informan Ibu Zuraida (Seorang istri DPR F-PKS Musi Banyuasin) yang dilakukan pada tanggal 28 November 2019 di Desa Sri Gunung.

³⁹ Musheni, *Artikel : Ayo Lebih Baik!* . (Sekertaris Umum DPD PKS Musi Banyuasin).

terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat yang majemuk berdasarkan ajaran Islam.

3. Mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya dan tidak menyalahgunakan jabatan.
4. Menjalankan tugas untuk mendengarkan suara rakyat dan siap memperjuangkannya. Saya akan membuka kanal-kanal di berbagai sarana yang bias dihubungi, untuk menerima masukan dan perintah dari rakyat untuk kami perjuangkan melalui PKS maupun sebagai relawan pembangunan.
5. Menyelenggarakan kampanye damai, mendidik jauh dari hal-hal yang membuat ongkos politik jadi tinggi dan menjadi sumber kemungkinan. Kami akan menjadikan kampanye dan Pemilu sebagai wahana pendidikan politik bagi warga, untuk mewujudkan kematangan berdemokrasi, tidak menjadikan kampanye dan Pemilu sebagai ajang perpecahan dan disharmoni bagi warga masyarakat.
6. Berjanji jika terpilih akan membentuk fraksi PKS untuk rakyat dan berjuang bersama rakyat dan bekerja untuk rakyat bagi semua rakyat. Mengutamakan kepentingan rakyat, selalu melayani rakyat dan akan tetap berada ditengah rakyat, dan tidak akan meninggalkan rakyat pemilih, kantor-kantor partai dan fraksi PKS akan menjadi tempat rakyat dapat memperoleh solusi permasalahannya.

Dari keterangan diatas, kita dapat melihat keseriusan dari para Caleg PKS untuk mengabdikan kepada masyarakat Musi Banyuasin. Hal tersebut yang menjadikan landasan untuk kerja ikhlas dan kerja tuntas dalam menjalankan amanah yang akan diberikan oleh masyarakat Musi Banyuasin nantinya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ketua DPD PKS Musi Banyuasin Bapak Amir Arifudin mengenai strategi Partai Keadilan Sejahtera dikatakan bahwa

“Partai Keadilan Sejahtera harus mensolidkan semua caleg dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019. Ketika calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera sudah solid maka akan mudah menarik simpati masyarakat Musi Banyuasin. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengawasi perhitungan Pemilu, membentuk para saksi dari Partai Keadilan Sejahtera pada tiap TPS yang ada di kabupaten Musi Banyuasin serta melakukan komunikasi dengan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Ketika Partai Keadilan Sejahtera melakukan hal ini maka akan berdampak positif bagi para caleg dan Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019. Dengan melakukan hal ini, Partai Keadilan Sejahtera dapat memantau perhitungan suara yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya suara dari Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri agar tidak kehilangan hasil suara maupun penambahan suara di Partai lain sehingga proses Pemilihan Umum itu akan berjalan dengan baik atau tidak terjadi

*kecurangan pada tiap-tiap TPS terhadap hasil suara untuk Partai Keadilan Sejahtera”.*⁴⁰

Dalam upaya mensolidkan internal atau kader-kader, PKS mengembangkan infusi ideologi. *Halaqah* pada level kader biasa atau usrah pada level elite partai atau juga kerap secara formal disebut Taklim Rutin Mingguan (TRM) menjadi salah satu media terpenting dari infusi ideologi ini. Dalam *halaqah*, nilai-nilai itu diperkenalkan, dipelihara, dikembangkan, dan di implementasikan oleh seluruh kader dibawah pengawasan murabbi (guru) yang berperan sebagai apparatus ideology itu sendiri. Suasana *halaqah* yang terbatas berkisar 5-12 kader, memungkinkan transfer idealisme dan juga kontrol pelaksanaannya menjadi lebih intensif.

Menurut peneliti dengan penguatan dan pengokohan terhadap internal PKS mulai dari Pengurus Daerah (DPD), Pengurus Cabang (DPC) hingga ke pengurus ranting (DPRa). Mililitansi dan soliditas antara pengurus kabupaten dengan pengurus-pengurus yang ada di tiap kecamatan hingga desa-desa desa yang solid akan menciptakan semangat bersama dalam mensukseskan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan informan Bapak Amir arifudin (Ketua DPD PKS Musi banyuasin) yang telah dilakukan pada tanggal 28 November 2019 di Desa Mekar Jadi.



Gambar 1.2

Wawancara dengan bapak Amir Arifudin (Ketua DPD PKS Musi Banyuasin).

Selain itu, dalam mengkampanyekan dan mempromosikan diri PKS menjanjikan akan menyuarakan di parlemen program unggulannya yaitu: membebaskan pajak motor ber-cc kecil, SIM seumur hidup, membebaskan pajak penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan < 8 juta, dan mendukung dalam pemecahan Kabupaten MUBA TIMUR. Serta dengan kerja ikhlas dan kerja tuntas antara kader-kader partai PKS dan para Caleg PKS yang bertarung pada Pemilihan Legislatif akan lebih mudah mengawasi kecurangan-kecurangan yang terjadi terhadap hasil suara, sehingga akan meminimalisir kecurangan oleh kelompok atau individu lain yang ingin bermain kotor terhadap hasil suara PKS di Musi Banyuasin dan menciptakan keharmonisan antar sesama caleg dan partai. Intinya militansi seperti ini akan menjadikan Pemilihan Legislatif di Musi

Banyuasin dapat berjalan dengan baik bagi PKS karena tidak akan kehilangan suaranya.

Dari penjelasan diatas, maka penulis menyatakan bahwa strategi politik Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin adalah pemilihan kader-kader yang terbaik, merekrut calon legislatif dari tokoh masyarakat, Partai Keadilan Sejahtera harus selalu hadir sepanjang waktu dan mensolidkan semua calon legislatif dalam kemenangan di Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019. Hal ini harus dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera demi mencapai kemenangan pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019.

Berdasarkan temuan di lapangan adanya korelasi antara teori yang peneliti gunakan. Sebagaimana telah disebutkan dalam teori strategi *offensive* dan *defensive* yang dikemukakan oleh Benoit, PKS untuk mencapai tujuannya dalam memperoleh kursi di DPRD, PKS harus mampu melihat peluang dan ancaman yang berkaitan dengan apa yang dilakukan dan untuk siapa. Dengan cara melakukan:

1. *Strategy Offensive* (Strategi menyerang). Dalam pemilihan legislatif 2019, strategi yang digunakan PKS untuk menggalang dukungan massa dari masyarakat Musi Banyuasin, antara lain sebagaimana yang dikatakan ketua DPD PKS Musi Banyuasin⁴¹; *pertama PKS yang mendatangi langsung tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki basis massa untuk di jadikan caleg dari PKS, kedua menjaring kader-kader yang militant*

⁴¹ Hasil wawancara dengan informan Bapak Amir Arifudin (Ketua DPD PKS Musi Banyuasin) yang dilakukan pada tanggal 28 November 2019 di Desa Mekar Jadi.

terutama kaum milenial mulai dari sekolah hingga kampus-kampus, ketiga membawa suatu program yang menjajikan perubahan seperti SIM seumur hidup, bebas pajak kendaraan bermotor ber-cc kecil, membebaskan pajak pendapatan yang berpenghasilan rendah, serta mendukung pemekaran kabupaten MUBA Timur, keempat PKS tidak lagi mempertahankan eksklusif partainya yang hanya berorientasi sebagai partai kader tetapi sekarang sudah menjadi partai Islam terbuka. Dengan melakukan hal tersebut dampak positif bagi perolehan suara PKS yang mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan menjadikan PKS merupakan partai yang digandrungi oleh masyarakat Musi Banyuasin.

2. *Defensive Strategy* (Strategi mempertahankan). Dalam menentukan kesuksesan dalam pemilihan legislatif PKS mengoreksi kembali apa yang telah terjadi. Melakukan strategi mempertahankan diri dengan pengkambing hitaman seperti apa yang terjadi dalam kasus yang menyeret elite PKS kemaren tidak ada kaitannya sama sekali dengan partai. Sebagaimana apa yang disampaikan Sekertaris DPD PKS Musi Banyuasin Bapak Musheni⁴² “dalam menerangkan kepada masyarakat Musi Banyuasin tentang apa yang menyeret mantan ketua DPD PKS Musi Banyuasin (Dear Fauzil Azim) yang menjadi anggota DPRD Musi Banyuasin yang terseret kasus korupsi bersama mantan Bupati Musi Banyuasin (Pahri Azhari) itu tidak ada kaitannya dengan partai dan itu semua hanya oknum yang bermain, karena partai tidak pernah menginstruksikan kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi” dengan mengatakan itu, sehingga PKS dapat menyangkal pandangan

⁴² Hasil wawancara dengan informan Bapak Musheni (Sekertaris Umum PKS Musi Banyuasin) yang telah dilakukan pada tanggal 04 Desember 2019 di Kantor DPD PKS Sekayu.

negatif masyarakat Musi Banyuasin dan menjadikannya partai yang cukup populer.

Dengan demikian strategi politik merupakan suatu taktik yang harus dimiliki dan disiapkan oleh seorang Caleg maupun sebuah partai PKS dalam mengkampanyekan dan mempromosikan diri kepada masyarakat luas untuk menghadapi pertarungan pada Pemilihan Legislatif demi merealisasikan cita-cita politik, yaitu untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dengan cara mendapat pengaruh sebanyak mungkin dan meraih hasil (suara) yang maksimal di Pemilihan Legislatif guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada kemaslahatan rakyat.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019

Hambatan yang dihadapi PKS selama kampanye seperti, rendahnya dukungan partai terhadap caleg tertentu, tidak semua tim sukses membantu pencalonan secara ikhlas, terdapat tim sukses yang memanfaatkan moment Pemilu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melakukan manipulasi data atas perolehan suara politik kandidatnya, terdapat tim sukses yang rangkap jabatan (menjadi tim sukses pada caleg lain) dan selama berkampanye masyarakat banyak menuntut materi yang berlebihan.

Dalam pilihan politik ini merupakan bentuk perilaku sosiologis dimana perilaku ini berpengaruh pada pilihan politik, khususnya pilihan politik pemilih pemula dimana pemilih pemula cenderung akan mengikuti pilihan politik orang tuanya. Dalam politik kepartaian di Musi Banyuasin agama adalah faktor yang dipercayai sangat penting mempengaruhi perilaku pemilih.⁴³

Perilaku pemilih dalam hal ini rasional merupakan pilihan politik yang berasal dari internal pemilu itu sendiri. Dengan kata lain pemilih merupakan bentuk individu yang independen yang memiliki hak secara bebas untuk menentukan atau memilih kandidat siapa pun. Pilihan politik tersebut merupakan hasil dari pemikiran dan informasi yang telah didapat yang menghasilkan penilaian terhadap kandidat tertentu. Perilaku ini didukung oleh hasil karya tulisan Downs, pilihan rasional berkembang dalam arah yang bervariasi. Teori rasional mengambil preferensi, keyakinan, dan strategi feasible individu sebagai penyebab tindakan yang mereka lakukan.⁴⁴

Perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya memilih alternatif yang paling menguntungkan (maximum gained) atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil yang penting mendahulukan selamat. Suatu moral rasional mengacu pada proses sosialisasi yang menyongsong yang menghasilkan instansi hati nurani yang sesuai dengan moral rasional itu, yaitu

⁴³ Saiful Mujani, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi. Kuasa Rakyat. "Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan legislative dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru", hlm.9-10.

⁴⁴ David Marsh dan Gerry Stoker. Teori dan Metode dalam Ilmu Politik. (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm.82.

pembentukan superego yang cocok dengan moral rasional itu.⁴⁵ Oleh karena itu, diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan, begitu juga mampu menilai calon kandidat yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini dapat didasarkan pada jabatan informasi dan pribadi yang populer atau prestasi yang dimilikinya.

Segala kemungkinan penghambat dan kendala yang akan terjadi juga sudah diantisipasi. Rapat antara internal PKS dengan Para Caleg juga sering dilakukan demi kerjasama yang baik pada saat Pemilihan Legislatif berlangsung. Namun ketika melihat kejadian dilapangan, maka tentunya semua strategi yang dijalankan tidak semulus apa yang direncanakan. Berbagai macam kendala pada saat mengkampanyekan dan mempromosikan diri baik itu Partai PKS maupun celeg-caleg dari PKS yang ikut bertarung pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 memiliki ragam problem.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Ketua DPD Musi Banyuasin Bapak Amir Arifudin mengenai kendala-kendala yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

“yang menjadi kendala bagi Partai Keadilan Sejahtera adalah masalah finansial atau keuangan. Seseorang calon legislatif harus memiliki dana yang besar untuk mengikuti Pemilihan Legislatif. Tidak dapat dipungkiri modal yang besar itu harus digunakan oleh calon legislatif meskipun calon legislatif harus menghindari money politic (politik uang). Karena pada dasarnya, modal itu dapat

⁴⁵ F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberalatif. (Yogyakarta : PT. Kanisius, 2009), hlm. 70.

*digunakan untuk melakukan kampanye dan mengenalkan seseorang calon legislatif itu kepada masyarakat Musi Banyuasin. Sehingga, masyarakat Musi Banyuasin menjadi tahu dan dapat memilih calon legislatif yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera”.*⁴⁶

Menurut Peneliti, pendapat Bapak Amir Arifudin sangat relevan dengan realitas lapangan masyarakat kita sekarang. Masalah finansial ini harus dimiliki oleh semua Calon Legislatif, karena untuk menjangkau masyarakat dan untuk menyebarkan brosur maupun tanda pengenalan lainnya dari caleg tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Tidak bisa dipungkiri apabila seorang caleg tidak memiliki sumber dana yang cukup maka akan dipastikan persentase dia untuk memenangkan kompetisi pada Pemilihan Legislatif sangat kecil. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya masalah finansial adalah jantung seorang caleg untuk memobilisasi masa dan menarik simpati dari masyarakat Musi Banyuasin.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bendahara Umum PKS Musi Banyuasin Bapak Feri Setiawan mengenai kendala-kendala yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2019

“yang menjadi kendala bagi Partai Keadilan Sejahtera adalah jaringan keluarga. Menurut Bapak ferri Setiawan, keluarga itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang calon legislatif karena dengan jaringan keluarga yang besar banyak para caleg PKS yang tidak memiliki jaringan keluarga yang luas,

⁴⁶ Hasil wawancara dengan informan Bapak Amir Arifudin (Ketua DPD PKS Musi Banyuasin) yang telah dilakukan pada tanggal 28 November 2019 di Desa Mekar Jadi.

*karena keluarga itulah yang dapat mempromosikan seorang caleg dari mulut ke mulut. Sehingga, seorang caleg tersebut dapat memiliki suara terbanyak dalam Pemilihan Legislatif. Semakin besar jaringan keluarga maka peluang untuk memenangkan Pemilihan Legislatif itu semakin besar.*⁴⁷

Menurut peneliti, pendapat Bapak Feri Setiawan sangat penting diperhatikan bagi para calon legislatif khususnya Partai Keadilan Sejahtera yang bertarung pada Pemilihan Legislatif tahun 2019. Seorang caleg harus mengerti bahwasannya gerak aktif keluarga juga ikut andil besar dalam menentukan keberhasilan caleg tersebut. Dimana pemilih biasanya memilih atas dasar kekeluargaan dan kekerabatan, dimana keluarga terpandang di masyarakat akan lebih berpengaruh dan diikuti arahan politiknya. Sehingga seorang caleg harus memiliki jaringan keluarga yang luas untuk mempromosikan dirinya untuk terpilih menjadi anggota dewan karena keluarga adalah investasi politik jangka panjang.



⁴⁷ Hasil wawancara dengan informan Bapak Feri Setiawan (Bendahara Umum PKS Musi Banyuasin) yang telah dilakukan pada tanggal 28 November 2019 di Desa Sri Gunung.

Gambar 1.3
Wawancara dengan bapak Feri Setiawan (Bendahara Umum PKS
Musi Banyuasin).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Toha Masyarakat Musi Banyuasin mengenai kendala-kendala yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2019

*“seorang calon legislatif harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Hal itu diperlukan karena banyak pemilih pemula yang perlu diyakinkan yakni kaum milenial. Kaum milenial itu pemilih yang sulit untuk diyakinkan Sehingga, apabila seorang caleg tidak memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dalam meyakinkan mereka maka dapat dipastikan para caleg tersebut akan sulit mendapatkan suara dari kaum milenial tersebut. Sebaliknya, apabila para caleg itu bisa meyakinkan kaum milenial sebagai pemilih pemula maka suara dari kaum milenial ini bisa didapatkan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang calon legislatif khususnya dari Partai Keadilan Sejahtera”.*⁴⁸

Menurut peneliti, penadapat Bapak Ahmad Toha merupakan suatu yang harus dimiliki oleh seorang Calon Legislatif dan timsesnya. Karena kaum milenial adalah pemilih pemula, dimana ini merupakan salah satu pasar politik bagi seorang caleg untuk menjaring suara-suara dari kaum milenial untuk duduk di kursi DPRD. Untuk itu seorang calon legislatif itu harus mampu membangun kedekatan persuasif dengan kaum milenial tersebut melalui komunikasi-komunikasi politis

⁴⁸ Hasil wawancara dengan informan Bapak Ahmad Toha (DPRD Provinsi terpilih) yang telah dilakukan pada tanggal 28 November 2019 di Desa Sri Gunung.

yang efektif. Sehingga nantinya caleg tersebut dapat menampung aspirasi dari kaum milenial tersebut untuk lebih disuarakan apabila ia sudah terpilih dan menduduki kursi DPR.



Gambar 1.4

Wawancara dengan Bapak Ahmad Toha (Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumsel).

Disamping itu juga, Bapak Musheni, S.Pd.i sebagai Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera Musi Banyuasin menerangkan bahwa “ *yang menjadi kendala Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif adalah masalah finansial atau keuangan, jaringan keluarga, minimnya alat peraga kampanye, dan komunikasi yang tidak efektif bagi calon legislatif di Musi Banyuasin serta komunikasi yang masih kurang serasi antar sesama caleg terutama caleg pusat yang masih minim dalam kuantitas sosialisai ke masyarakat kabupaten Musi Banyuasin sehingga berdampak pada ketimpangan hasil suara partai, antara suara partai untuk pusat dan untuk daerah sangat kontras perbedaannya yaitu*

*suara partai untuk pusat meraih 17.998 suara dan kabupaten meraih 30.223 suara”.*⁴⁹

Dari penjelasan diatas, maka penulis dapat menerangkan bahwa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan Legislatif di Musi Banyuasin pada Tahun 2019 adalah masalah finansial atau keuangan, jaringan keluarga, minimnya alat peraga kampanye dan komunikasi yang efektif. Faktor tersebut juga tidak serta merta menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi PKS Musi Banyuasin, namun sudah menjadi faktor umum menjadi kendala yang dihadapi PKS di berbagai daerah di bumi Nusantara. Sehingga, perlu adanya pematangan yang lebih intensif kepada PKS dan para calegnya saat akan mengikuti pertarungan pada Pemilihan legislatif. Menurut hemat penulis, ketika permasalahan tersebut dapat diatasi maka Partai Keadilan Sejahtera akan dapat dengan mudah menarik simpati dari masyarakat Musi Banyuasin untuk memilihnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis terhadap Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Musi Banyuasin tahun 2019 maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

⁴⁹ Hasil wawancara dengan informan Bapak Musheni (Sekertaris Umum PKS Musi Banyuasin) yang telah dilakukan pada tanggal 04 Desember 2019 di Kantor DPD PKS Sekayu.

1. Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 secara *offensive* adalah memilih kader-kader terbaik, mendatangnya langsung tokoh masyarakat dan merekrutnya untuk menjadi caleg dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera harus selalu hadir sepanjang waktu dan mensolidkan semua calon legislatif dalam memenangkan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019. Strategi PKS Musi Banyuasin secara *defensive* menyangkal kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi pada elite PKS dimasa lampau hanya tindakan oknum PKS yang nyeleweng dan tidak ada kaitannya dengan partai.
2. Yang menjadi kendala Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 adalah masalah finansial atau keuangan, jaringan keluarga, minimnya alat peraga kampanye, dan komunikasi yang tidak efektif bagi calon legislatif di Musi Banyuasin serta komunikasi yang masih kurang serasi antar sesama caleg terutama caleg pusat yang masih minim dalam kuantitas sosialisai ke masyarakat kabupaten Musi Banyuasin sehingga berdampak pada ketimpangan hasil suara partai untuk pusat dan suara partai untuk daerah.

B. SARAN

Penelitian yang dilakukan berhasil menganalisa masalah yang dihadapi PKS Musi Banyuasin dalam menyusun strategi dan juga kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

1. Sebaiknya PKS dalam menyiapkan strategi lebih matang dalam membentuk karakter baik dari internal PKS maupun caleg-calegnya, sehingga strategi yang disiapkan oleh PKS dapat menjangkau masyarakat dan efektif diterapkan pada masyarakat Musi Banyuasin.
2. Berbagai kendala yang terjadi dilapangan, mesti ditanggulangi dengan menjalalin komunikasi yang lebih baik lagi antar pengurus antar sesama caleg serta komunikasi dengan para tokoh yang memiliki jaringan yang besar, sehingga harapannya pada pemilihan legislatif mendatang memperoleh kemenangan yang lebih berkah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Anwar. 2013. *Komunikasi Politik : Paradigma, Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta : PT. Balai Pustaka.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Cet Ke-13, Jakarta : Rineke Cipta.

Budiarjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Hardiman, Budi, F. 2009. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta : PT. Kanisius.

Masyuri dan M. Zinudin. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Narbuko, Cholid. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.

Salusu, J. 1996. *Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta : Prenada.

Noor, Firman. 2015. *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di dekade awal Reformasi*. Jakarta : LIPI.

Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Topatimasang, Roem. 2011. *Menutup Pintu Masuk Politik Uang*. Jakarta : Maarif Institute.

Winardi. 2003. *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Jakarta : Prenada Media.

Internet

<http://www.voaindonesia.com>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019.

m.liputan6.com, Moch. Harun Syah, diakses pada tanggal 05 September 2019.

m.cnnindonesia.com, Joko Panji Sasongko, diakses pada tanggal 22 September 2019.

Skripsi

Abdullah, *Membangun Citra Partai Politik Masa Depan (Studi Deskriptif Strategi Humas PPP Sleman, DIY dalam Membangun Citra)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Hendra Fauzi, *Strategi Politik Calon Legislatif Perempuan dalam Memenangkan Pemilihan Legislatif 2009 (Studi Pada Calon Legislatif di Dapil 6, Kecamatan Natar Lampung Selatan)*, Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung 2010.

Muhammad Ayub Liwang, *Kekuatan dan Staretgi Politik dalam Pemilukada Analisis Terhadap Kemenangan Adnan Purichta Dalam Pilkada Kabupaten Goa*, Skripsi UIN Alauddin Makassar (Makassar : 2016).

Rasniati, *Strategi Pemenangan Pasangan Raden Adipati Sury dan Edward Antoni dalam Pemilukada 2015 di Way Kanan*, Skripsi UIN Raden Intan Lmpung (Lampung : 2016).

Tarmijin, *Strategi Pemenangan Partai Amanat Nasional (Studi Terhadap Kemenangan PAN pada Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Bima)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar (Makassar : 2017).

Jurnal

Masduki, “Strategi Pemulihan Citra Partai Politik : Kasus Partai demokrat”, dalam Unisia, Vol. XXXVI no.8 1 Juli 2014.

Artikel

Musheni, “PKS Sumsel Dapil IX”.

Musheni, “Rakornas PKS 2019”.

Musheni, “Fraksi PKS Musi Banyuasin”.

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.
2. Dokumentasi Penelitian.

3. Artikel DPD PKS Musi Banyuasin.
4. Lampiran Lainnya.

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Strategi politik PKS dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 ?

2. Dari beberapa strategi yang bapak persiapkan, strategi apa yang paling mengena sehingga bisa menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat ?
3. Apakah elite PKS yang terseret kasus korupsi kemaren merupakan bagian dari jalan PKS dalam memperoleh keuntungan pribadi?
4. Visi dan misi PKS yang berkaitan untuk kemajuan masyarakat Muba seperti apa pak ?
5. Janji-janji kampanye politik PKS itu apa saja pak ?
6. Dalam menentukan kader yang mencalonkan diri karakteristiknya yang mendasar itu harus dimiliki seperti apa pak ?
7. Kalau boleh tahu pak, imagenya masyarakat Muba terhadap PKS itu seperti apa pak ?
8. Pak, Alhamdulillah PKS unggul di tahun 2019 ini, tanggapan Bapak selaku petinggi Politisinya seperti apa ?
9. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi PKS dalam Pileg di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019 ?
10. Apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut ?
11. Apakah kendala-kendala tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara PKS di Kabupaten Musi Banyuasin ? mengapa ?
12. Solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ayo Lebih Baik !

Oleh : Musheni,S.Pd.I

Sekretaris Umum DPD PKS Musi Banyuasin 2015-2020

“Kemenangan yang kita peroleh, harus kita syukuri. InsyaAllah, Allah akan berikan kemenangan yang berkah. Salah satu cara untuk

mensyukuri kemenangan ini tetap lakukan khidmat kepada ummat. Datangi tokoh tokoh, berbuat baik kepad masyarakat,” Pesan Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Salim Seggaf Aljufri. Pesan Ketua Majelis Syuro PKS tersebut mempunyai makna yang cukup mendalam bagi kader PKS. Beliau ingin menyampaikan bahwa kemenangan PKS bukanlah karena kekuatan usaha PKS itu sendiri, tetapi keberhasilan PKS justru karena pertolongan Allah swt. Pertolongan Allah swt tersebut harus disyukuri baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Secara vertikal, bentuk syukur adalah dengan semakin menguatkan hubungan kepada Allah swt. Adapun secara horizontal, bentuk syukur adalah dengan memperluas dan memperbesar pelayanan kepada masyarakat dan ummat.

Pada artikel ini, penulis ingin menyampaikan serta memberikan gambaran yang lebih spesifik rencana kerja dan kerja FPKS Musi Banyuasin 2019-2024 bagi kemajuan daerah, bangsa dan negara serta kemajuan ummat. Oleh karenanya, Fraksi sebagai etalase organisasi partai politik mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam mengimplementasikan visi dan misi partai di lembaga formal pemerintah dan masyarakat. PKS mempunyai visi yakni “ Menjadi partai dakwah yang kokoh dalam berkhidmat untuk umat, bangsa dan negara”. Dari visi tersebut, lahirlah empat misi utama PKS yakni 1. Memperkokoh jati diri partai kader yang berkarakter bersih, peduli dan profesional. 2. Memperkokoh Good Party Governance melalui sistem Manajemen Partai Dakwah 3. Menjadikan PKS sebagai pelopor dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan rakyat. 4. PKS menjadi kontributor Peradaban.

Fraksi PKS 2019-2024

Terbentuknya Fraksi PKS secara mandiri periode 2019-2024 menjadi estafet saluran aspirasi masyarakat, Kehadiran FPKS paling tidak mempunyai 3 peran utama yakni advokasi atas aspirasi masyarakat, penguatan legislasi yang mendukung tumbuh kembangnya masyarakat kecil dan kemitraan dalam kontrol terhadap roda pemerintahan. Tiga fungsi dan peran anggota DPRD tersebut tentu saja dimulai dari awal proses pengajuan calon anggota legislatif hingga kemudian hadirnya anggota dewan terpilih 2019-2024. Sebagai modal dan bekal caleg terpilih, PKS telah memulai dengan adanya delapan komitmen sebagai calon anggota DPRD. Tentu saja, bekal dan komitmen tersebut bagian dari yang tak terpisahkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi partai melalui kader kader partai di parlemen.

Berikut ini delapan komitmen Caleg PKS 2019, yang insyaAllah komitmen ini akan menjadi landasan pula dalam menjalankan peran dan fungsi calon anggota DPRD terpilih yakni ; 1. Senantiasa menjaga integritas dan kinerja untuk mensejahterakan umat bangsa dan negara, serta senantiasa menjaga nama baik PKS dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, akan terus menjunjung tinggi prinsip, akhlak serta jati diri kader PKS yang bersih peduli dan profesional. 2. Berpegang teguh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan PKS, serta setia kepada

pimpinan partai seluruh keputusan dan kebijakannya selama tidak maksiat pada Allah dan rasulnya. 3. Menjalankan visi misi, falsafah perjuangan dan platform pembangunan PKS dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan sungguh-sungguh. Akan terus menjalankan dan memperkuat persatuan, harmoni dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang majemuk berdasarkan ajaran Islam, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika dalam NKRI. 4. Mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya dan tidak menyalahgunakan jabatan wewenang yang diamanahkan oleh partai dan atau negara sebagai sarana untuk memperkaya diri dan atau orang lain. 5. Terus menempa diri agar mampu menjalankan tugas sebagai anggota DPR , kami menyatakan siap menerima tugas dari rakyat jika diberi amanah oleh rakyat untuk duduk sebagai anggota DPR . Dan siap menjadi relawan pembangunan sesudah pemilu. 6. Menjalankan tugas untuk mendengarkan suara rakyat, dan siap memperjuangkannya. Saya akan membuka kanal-kanal komunikasi di berbagai sarana yang bisa dihubungi, untuk menerima masukan dan perintah dari rakyat untuk kami perjuangkan melalui PKS maupun sebagai relawan pembangunan. 7. Menyelenggarakan kampanye damai, mendidik jauh dari hal-hal yg membuat ongkos politik jadi tinggi dan menjadi sumber korupsi. Kami akan menjadikan kampanye dan pemilu sebagai wahana pendidikan politik bagi warga, untuk mewujudkan kematangan berdemokrasi, tidak menjadikan kampanye dan pemilu sebagai ajang perpecahan dan disharmoni bagi warga masyarakat. 8. Berjanji jika terpilih akan membentuk fraksi PKS untuk rakyat dan akan berjuang bersama rakyat dan bekerja untuk rakyat bagi semua rakyat. Mengutamakan kepentingan rakyat, selalu melayani rakyat dan akan tetap berada di tengah rakyat, dan tidak akan meninggalkan rakyat pemilih, kantor-kantor partai dan fraksi PKS akan menjadi tempat rakyat dapat memperoleh solusi permasalahannya.

Fakta integritas ini mengikat sebagai calon anggota DPR maupun anggota partai. Apabila tidak memenuhi pakta integritas ini, maka dalam pernyataan caleg tersebut bersedia menerima sanksi apapun yang ditetapkan oleh partai, dan tidak akan menuntut atas sanksi yang dijatuhkan. Delapan komitmen tersebut menjadi dasar dasar serta haluan akftitas kedewanan. Dengan demikian, harapan masyarakat , harapan kader dan harapan dari konstituen dapat diperjuangkan dengan mengikuti butir butir komitmen tersebut. Lebih dari itu, komitmen caleg terpilih tersebut merupakan sekaligus sebagai wujud komitmen dalam membangun masyarakat yang adil sejahtera.

Dalam konteks kabupaten Musi Banyuasin, komitmen caleg tersebut mempunyai arti penting dalam menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap PKS. Cerminan kepercayaan masyarakat terhadap PKS dapat dilihat dari hasil Pemilu 2019 yang memperoleh dukungan dengan peningkatan 100 % suara. Bila Pemilu 2014 PKS Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh suara 15.625 suara dengan perolehan kursi

sebanyak 3 kursi, maka pada Pemilu 2019 PKS Musi Banyuasin memperoleh suara sebesar 30.000 suara dengan perolehan kursi sebanyak 4 kursi. Demikian pula dengan suara PKS di dapil IX Provinsi (Musi Banyuasin), dari perolehan suara 11.000 suara pada Pemilu 2014 menjadi 26.000 suara pada Pemilu 2019 dengan perolehan 1 kursi. Kenaikan dukungan atau pemilih PKS pada tahun 2019 memang mempunyai banyak faktor, akan tetapi peran dan fungsi Anggota FPKS pada periode 2014-2019 yang lalu juga mempunyai kontribusi. Hal ini pula menjadi latar belakang adanya komitmen Caleg terpilih nantinya dapat memberikan kontribusi pula dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap PKS yang berbuah pada semakin besarnya angka pemilih PKS di masa mendatang.

PKS Bersama Masyarakat

PKS memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah dalam program suster City Sekayu- Al Zawaida Gaza Palestina. Perhatian bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex terhadap Warga Palestina dengan melaksanakan pengalangan dana untuk masyarakat Gaza Palestina merupakan bentuk dari implementasi dari “ kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Dalam bahasa PKS, program suster City Sekayu- Al Zawaidah Gaza Palestina merupakan bentuk “ kontribusi bagi peradaban dunia”. Lahirnya Perda No 2 Tahun 2018 tentang pengaturan pesta rakyat di kabupaten Musi Banyuasin memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak, remaja, dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Mengingat, keberadaan pesta rakyat di malam hari bukan hanya sarana tempat terjadinya lokasi prostitusi, peredaran narkoba, dan perjudian. Lebih dari itu, kehadiran acara pesta rakyat di malam hari menimbulkan pencemaran suara di saat-saat masyarakat lainnya membutuhkan istirahat. Perda tersebut bagi PKS mempunyai arti penting dalam upaya pengarusutamaan “ Ketahanan Keluarga”. Perda tersebut memberikan proteksi kepada keluarga dari berbagai bentuk *broken home*, kenakalan remaja, dan berbagai bentuk efek negatif dari kegiatan hura-hura lainnya.

Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Zakat PNS, BUMD dan perusahaan yang beroperasi di Musi Banyuasin yang peyalurannya melalui BAZDA merupakan upaya melaksanakan perintah Allah swt serta mewujudkan bentuk gotong royong dalam meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Kedepan, PKS melalui Fraksi PKS, akan selalu berikhtiar memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan berbagai produk legislasi, kontrol pemerintahan dan anggaran pro rakyat.

Pun demikian, pemerintah daerah hendaknya semakin peka terhadap permasalahan masyarakat. Di aspek pendidikan, perlunya pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap lembaga-lembaga swasta yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Terlebih lagi, kehadiran lembaga pendidikan Islam tersebut upaya mendukung

program pemerintah dibidang agama (masyarakat yang religius). Secara konseptual, pendidikan umum (SD/SMP/SMA) nampaknya perlu mengadopsi teori pendidikan Islam Terpadu. Mengingat, secara fasilitas pendidikan dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih baik bila dibandingkan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga lembaga pendidikan dibawah Departemen Agama (Depag). Dibidang ekonomi, adanya keluhan masyarakat atas hadirnya minimarket korporasi hingga ke desa desa yang hal itu dapat mematikan kehidupan warung warung tradisional. Demikian pula efek musim kemarau sehingga banyaknya petani gagal panen, pemerintah hendaknya dapat memberikan perhatian khusus.

Sebagai penutup tulisan ini, izinkan penulis menutup dengan kutipan dalam sebuah spanduk yang dipasang oleh DPD PKS Musi Banyuasin dalam kota Sekayu saat menyambut pelantikan anggota DPRD Musi Banyuasin pada Rabu, 11 September 2019 yang lalu, “ Doakan Kami semoga istiqomah, serta Amanah dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan umat,”. Dan kami ucapkan Terimah kasih masyarakat Musi Banyuasin yang telah menitipkan suaranya pada PKS. Semoga, PKS lebih baik lagi di masa depan dalam pelayanan, dan kontribusi bagi masyarakat.

Dinamika Pemilih PKS Pada Pileg 2019

Oleh : Musheni,S.Pd.I

Sekum DPD PKS Musi Banyuasin 2015-2020

Keberhasilan PKS mendapatkan kursi DPRD Sumsel Dapil IX (Musi Banyuasin) pada Pemilu 2019 patut untuk dipahami sebagai sebuah keberkahan tersendiri bagi PKS dan Masyarakat Musi Banyuasin. Perolehan suara PKS untuk provinsi secara total mendapatkan suara sebesar 26.552 suara dengan ranking kursi yang diraih kursi ke- 5 dari 6 kursi yang diperebutkan. Fenomena ini merupakan keberkahan yang diraih dari berbagai ikhtiar struktur,kader PKS, Caleg,relawan dan doa-doa para masyarakat yang mencintai kehadiran PKS. Setidaknya, ada tiga hal yang ingin didiskusikan dalam artikel ini terkait keberhasilan PKS meraih kursi DPRD Provinsi melalui dapil IX (Musi Banyuasin). Pertama, personal branding. Kedua, isue atau konten kampanye. Ketiga, organisasi atau track record PKS dalam kancah politik daerah, wilayah dan nasional.

Faktor Pendongkrak Suara PKS

Hasil suara secara personal, suara Ahmad Toha, SPd, MSi meraih suara terbanyak yakni 8.576 suara kemudian disusul suara terbanyak kedua Ir. Amir Husin sebanyak 5.962 suara. Secara berturut turut ranking ke tiga dan seterusnya adalah Ishar dengan suara 2.787 suara, Azahari, S.Pd sebanyak 2.296 suara, Utami Fransiska,S.Pd sebanyak 1.476 suara dan I.M. Fatimah,M.Pd meraih 940 suara. Salah satu faktor yang paling menonjol terdongkraknya suara PKS di Provinsi ini **Pertama, secara personal branding sebagai Mantan Calon Wakil Bupati Musi Banyuasin pada tahun 2017 yakni Ahmad Toha.** Dimulai dari keaktifan beliau sebagai sekretaris Presidium DOB Muba Timur, Ahmad Toha terus berkomunikasi dengan elit-elit politik daerah hingga akhirnya berpasangan dengan Amiri Arifin sebagai calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen. Ahmad toha yang rela melepaskan posisi ASN di Kementerian Departemen Agama Republik Indonesia dengan semangat menjalani kampanye, silaturahmi ke masyarakat hingga perolehan suara Amiri-Toha mendapatkan suara sebesar 27 % atau sekitar 65.000 suara. Modal jaringan dan modal politik inilah yang kemudian beliau lanjutkan untuk berkiprah politik praktis pada Pemilu 2019 melalui PKS sebagai calon DPRD Provinsi Sumsel dapil IX (Musi Banyuasin).

Selain Ahmad Toha, personal branding calon Anggota DPRD PKS yang lainnya juga secara personal menunjang suara PKS Provinsi Ir. Amir Hasin yang duduk sebagai anggota DPRD Muba 2009-2014 dan 2014-2019 tentu saja mempunyai jaringan yang cukup kuat dan pendukung militan yang berbasis di

daerah kecamatan Sungai Lilin dan merata di berbagai kecamatan lainnya. Hadir juga Azahari yang berasal dari kecamatan Sanga Desa aktif bersosialisasi kepada anak-anak muda dan mempublikasikan personal brandingnya di media sosial. Berbeda dengan Ishar yang berangkat dari Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Sungai Angit kecamatan Babat Toman mampu meraih suara terbanyak ketiga berkat memperkuat jaringan loyalisnya. Tidak lepas pula, sosok sri kandi caleg PKS yakni Utami Fransiska dan I.M Fatimah yang ikut serta berkontribusi dalam pendulangan suara PKS terutama di basis Sekayu dan sekitarnya.

Dari berbagai personal branding yang dimiliki masing-masing Calon Anggota DPRD Sumsel dari IX dari PKS tersebut adalah keterkenalan Ahmad Toha sebagai mantan calon Wakil Bupati Muba tahun 2017 silam mempunyai nilai politis yang cukup tinggi. Ada ketertarikan masyarakat terhadap personal branding Ahmad Toha yang berani tampil sebagai calon wakil bupati Muba tahun 2017 dengan membawa isu-isue perubahan yang ditawarkan. Terlebih lagi, pada waktu Pilkada 2017 lawan tanding Amiri – Toha adalah H. Dodi-Beni yang didukung oleh 11 partai politik. Nilai politis ini merupakan investasi politis yang cukup positif dalam memperkuat personal branding Ahmad Toha. Terlebih lagi, beliau juga merupakan sosok yang aktif sebagai Ustad (Guru) di Pondok Pesantren yang terbesar yang ada di Musi Banyuasin yakni Ponpes Assalam di Sri Gunung Sungai Lilin. Alumni dan santri ponpes Assalam yang tersebar di berbagai desa dalam Musi Banyuasin ikut membantu perolehan suara Ahmad Toha. Ahmad Toha juga mendapatkan profit politik dari caleg Kabupaten seperti suara Ahmad Toha di Kecamatan Plakat Tinggi yang diderek dari suara Caleg kabupaten dengan nomor urut 1 yakni H. Bunyamin. Ahmad Toha juga mendapatkan suport moral dari masyarakat Plakat Tinggi karena nama beliau juga mirip dengan salah satu anak tokoh Nahdatul Ulama (NU) kabupaten Musi Banyuasin yang ada di kecamatan Plakat Tinggi yakni almarhum KH. Marzuki. Masyarakat Plakat Tinggi mengenal Ahmad Toha sebagai putra Almarhum KH. Marzuki. Walaupun Ahmad Toha bukan anak kandung Almarhum KH. Marzuki, tetapi secara ideologi beliau mempunyai kesamaan dalam perjuangan untuk ummat dan Islam.

Kedua, konten kampanye yang sering dipublikasikan baik secara lisan saat kampanye dari panggung ke panggung acara masyarakat hingga publikasi dalam bentuk alat peraga kampanye. Konten kampanye yang paling sering muncul di masyarakat tentang caleg PKS Provinsi adalah PKS akan memperjuangkan SIM Seumur hidup dan Pajak gratis motor, PKS Provinsi terutama atas nama Ahmad Toha yang akan memperjuangkan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Musi Banyuasin Timur, Ahmad Toha yang mempunyai latar belakang sebagai Pendidik juga dipercaya mampu memperjuangkan nasib guru dan para pendidik. Selain itu, konten kampanye

yang disosialisasikan oleh masing masing caleg juga berdasarkan isue yang berkembang di lingkungan masing masing caleg tersebut. Konten kampanye ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat pemilih yang rasional untuk menitipkan suara pada PKS. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten kampanye dapat dilihat dari dukungan suara itu sendiri, bahkan basis pendukung caleg terpilih juga memberikan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Suara PKS untuk Provinsi dapil IX diraih oleh kecamatan Sungai Lilin dengan suara sebanyak 5.967 suara, kemudian diraih kecamatan Sekayu sebesar 3.600 suara, disusul oleh Kecamatan Sanga Desa dengan suara sebesar 2.022 suara. Kemudian secara berturut turut perolehan suara berdasarkan kecamatan yakni Plakat Tinggi sebanyak 1.943 suara, Kecamatan Babat Toman meraih 1.699 suara, Kecamatan Bayung Lencir sebanyak 1.568 suara, Babat Supat meraih sebanyak 1.541 suara, Kecamatan Tungkal Jaya sebanyak 1.362 suara, Kecamatan Lalan sebanyak 1.362 suara, Kecamatan Sungai Keruh meraih 1.305 suara, Kecamatan Lais sebanyak 1.199 suara, Kecamatan Keluang sebanyak 1.096 suara, kecamatan Batang Hari Leko meraih 1.036 suara dan Lawang Wetan meraih 893 suara.

Diantara isue atau konten kampanye yang paling diminati oleh pemilih terutama di bagian dapil Muba 3 dan 4 atau Muba bagian Timur adalah isue Pemekaran daerah. Secara rasional, konten kampanye tersebut cukup rasional. Hal ini dilihat secara geografis, Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Manusia (SDM). Bahkan, dalam sambutan Gubernur Sumsel H. Herman Deru pada acara paripurna HUT Muba ke 63 menyatakan bahwa Muba mempunyai rentan wilayah yang cukup luas. Walaupun secara tersurat tidak menyebutkan mendukung DOB Muba Timur. Tetapi, secara tersirat Gubernur Sumsel H. Herman Deru mendukung bila adanya usaha untuk memperkecil rentang wilayah Muba untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula dalam pembacaan riwayat singkat Muba yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Muba H. Apriyadi bahwa Muba mempunyai sejarah dalam pemekaran kabupaten Banyuasin. Artinya, lintasan sejarah Muba dalam melaksanakan pemekaran telah dimiliki. Bahkan, pemekaran daerah tersebut terlaksana di masa bupati H. Aleks Nurdiin, orang tua kandung dari Bupati Musi Banyuasin 2017-2022 Yakni H. Dodi Reza Aleks Nurdin. Sangat mungkin, H. Dodi Reza Aleks Nurdin akan membuat sejarah yang sama dengan H. Aleks Nurdin yang menyetujui Pemekaran Banyuasin dari Musi Banyuasin pada tahun 2004.

Ketiga, secara organisatoris, PKS baik ditingkat pusat hingga daerah mempunyai kesamaan dalam slogan yakni “Ayo Lebih Baik”. Slogan ini menjadi standar dalam berbagai aktifitas politik secara masif. Oleh karenanya, kegiatan dan aktivitas organisasi dilaksanakan dengan mengambil tema tema perbaikan. Secara organisasi, PKS juga melakukan upaya mobilisasi isue Rancangan Undang

–Undang (RUU) SIM Seumur hidup dan Bebas Pajak Motor, RUU Perlindungan Ulama dan Simbol Agama, Pembebasan Pajak Penghasilan yang dibawah 8 juta. Bahkan, secara aplikatif Calon Anggota DPR RI dari Dapil Sumsel I yakni H. Mustafa Kamal, SS mensosialisasikan janji janji tersebut ke masyarakat melalui Alat Peraga Kampanye (APK) dengan mengandeng caleg Provinsi dan Kabupaten. Spanduk berukuran 2 meter x 3 meter tersebut tersebar di berbagai desa dan pelosok kabupaten Musi Banyuasin. Bahkan, APK berupa kalender 2019 baik caleg DPR RI, Provinsi Sumsel maupun kabupaten selalu mensosialisasikan program tersebut.

Berbagai isue yang dimobilisasi oleh PKS tersebut bukan berdiri sendiri, tetapi mempunyai akar permasalahan yang ada dimasyarakat. Secara ekonomis, masyarakat ekonomi menengah kebawah di Indonesai yang tergantung dari ekonomi pertanian. Harga komoditas karet dan sawit yang masih jauh bila dibandingkan dengan harga masa pemerintahan SBY-Boediono. Pada masa pemerintahan SBY, harga karet pernah mencapai Rp. 20.000/ kg di petani. Akan tetapi, sejak 3 tahun silam harga karet di petani hanya kisaran Rp. 7.000- Rp. 10.000 per kg. Oleh karenanya, konsepsi RUU SIM Seumur hidup dan Pembebasan Pajak Motor menjadi salah satu paket solusi bagi masyarakat kecil dalam memperkecil pengeluaran untuk biaya produksi ekonomi dengan menggunakan sepeda motor. Demikian pula janji PKS untuk memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama dan simbol Agama didasari oleh kondisi adanya provokasi –provokasi oknum tertentu dengan menghina bahkan mempersekusi para ulama. PKS mempunyai pandangan bahwa salah satu media pencegahan terhadap provokasi oknum masyarakat melalui Persekusi Ulama dan Simbol Agama dengan melahirkan Undang-Undang yang menjamin para ulama dan simbol simbol Agama.

Tantangan dan Peluang

Tantangan PKS kedepan perlu diinventarisasi dalam upaya memetakan tantangan dan peluang menuju dan melanjutkan program program yang telah digulirkan dengan slogan “ Ayo Lebih Baik”. **Pertama, belum sinkronisasinya perolehan suara antara kabupaten, provinsi dan pusat.** Suara PKS dari 4 dapil untuk caleg kabupaten sebanyak 30.223 suara, sedangkan suara caleg untuk provinsi berjumlah 26.552 suara, dan suara DPR RI sebanyak 17.998 suara. Idealnya, suara PKS baik dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat mempunyai nilai yang sinkron atau seimbang atau mungkin sama. Hal yang berbeda dengan hasil suara Partai Golkar, suara DPR RI nya sebesar 82.927 suara, Suara Provinsi

62.552 suara dan suara kabupaten sebesar 55.272 suara. Suara Golkar dari kabupaten, provinsi dan pusat terjadi kenaikan yang signifikan. Ada ketimpangan yang cukup besar. Bila PKS suara kabupaten lebih besar (30.223 suara), dan suara DPR RI lebih kecil (17.998 suara), justru suara Golkar terbalik dengan perolehan suara PKS, suara Golkar lebih besar untuk DPR RI (82.927 suara) dan suara Kabupaten (55.272 suara). Ketimpangan suara PKS antara Kabupaten, Provinsi dan Pusat (DPR RI) menjadi tantangan tersendiri bagi PKS secara organisasi di masa mendatang. Hipotesa awal, banyak faktor penyebabnya mulai dari rendahnya pengamanan saksi di TPS, hingga kuantitas sosialisasi dan program caleg DPR RI secara real kemasyarakatan. Seiring dengan waktu, PKS perlu mencermati besarnya ketimpangan suara total PKS di daerah dengan suara total PKS untuk DPR RI. PKS perlu menyiapkan langkah-langkah sistematis untuk menguatkan basis ideologi partai, bukan hanya pemilih pragmatis.

Kedua, Ketokohan Ahmad Toha, S.Pd.I, Msi dimulai sebagai seorang tenaga pengajar di Ponpes Assalam, aktif dalam Presidium DOB Muba Timur, kemudian Ahmad Toha secara mengejutkan bersedia mendampingi Amiri Arifin maju sebagai Calon Bupati Musi Banyuasin pada Pilkada 2017. Perolehan suara Amiri-Toha mencapai 65.000 suara atau sekitar 27 % dari suara sah. Akan tetapi, dalam Pileg 2019 suara Ahmad Toha secara pribadi mendapatkan suara 8.576 suara atau sekitar 13 % dari suara saat Pilkada 2017 yang lalu. Persentase suara pribadi Ahmad Toha pada Pemilu 2019 dengan suara pada Pilkada 2017 memberikan catatan kepada kita bahwa kontribusi kehadiran sebagai mantan calon Wakil Bupati 2017 baru sebatas menaikkan popularitas. Sedangkan, elektibilitas Ahmad Toha masih dipengaruhi oleh suara kader partai, alumni pondok pesantren, dan jaringan kekeluargaan. Bahasa sederhananya adalah, ada 56.424 pemilih Amiri-Toha (Diusung oleh Independen) pada Pilkada 2017 yang lalu tidak memilih Ahmad Toha pada Pileg 2019. Padahal, pada Pilkada 2017 yang lalu kader-kader PKS mendukung Dodi-Beni dalam sosialisasi dan kampanye. Artinya, jumlah suara Ahmad Toha di Pileg ini bisa jadi lebih kecil lagi persentasinya bila berbasis suara murni dari Pemilih Amiri-Toha pada Pilkada 2017 yang lalu. Suara Ahmad Toha pada Pileg 2019 lebih besar dipengaruhi tiga hal utama yakni alumni pondok pesantren Assalam, jaringan keluarga dan kader kader PKS serta relawan relawan yang digerakkan untuk kemenangan Pemilu 2019 yang beliau format. Menjadi tantangan tersendiri bagi PKS mendatang untuk memperkuat basis pemilih baru melalui berbagai terobosan. Sebab, pada realitasnya terjadi pergeseran suara dan ceruk suara yang belum stabil. PKS perlu memperkuat pendidikan politik dan pembinaan kader kader partai yang mempunyai basis dukungan berbasis ideologis.

Ketiga, secara ringkas, PKS Musi Banyuasin dalam kompetisi Pilkada mendukung kader partai lain. Sebut saja, Bupati-Wakil Bupati yang pernah didukung oleh PKS. Pilkada tahun 2007, PKS mengusung H. Aleks Nurdin (Golkar)- H. Pahri Azhari (PAN), Pilkada 2011, PKS mengusung H. Pahri Azhari (PAN)- Beni Hernedi (PDIP-Perjuangan), demikian pada Pilkada 2017, PKS mendukung H. Dodi Reza Aleks (Golkar)- Beni Hernedi (PDIP). Walaupun demikian, PKS dalam kontestasi Pilkada mampu mengambil profit politik dengan membuka luas sarana komunikasi dengan tokoh tokoh masyarakat dan basis masa baru bagi PKS. Sarana Pilkada 2017 memberikan kontribusi pula bagi PKS dalam Pemilu 2019 dalam upaya meningkatkan popularitas partai. Bahkan dalam berbagai publikasi dan dokumentasi internal DPD PKS Musi Banyuasin selalu berkomitmen dalam memperkuat calon yang diusung dengan melipatgandakan dukungan dari suara ril suara Pemilu sebelumnya. Komitmen PKS berkontribusi dalam mendukung suara H. Dodi- Beni pada Pilkada 2017 dengan poin 200 % dari suara hasil Pileg 2014. Komitmen tersebut menjadi terealisasi bila diukur dari hasil suara kabupaten PKS pada tahun 2014 sebesar 15.552 suara menjadi 30.223 suara pada Pileg 2019. PKS mempunyai tantangan sekaligus harapan pada Pilkada 2022 mendatang. PKS harus bisa mengambil momentum Pilkada untuk memperkuat jaringan suara PKS pada Pileg 2019. Bahkan mungkin, PKS harus menjadikan Pileg 2019 sebagai basis untuk negosiasi komposisi pasangan Calon Bupati- Wakil Bupati Musi Banyuasin pada tahun 2022 mendatang. Sangat mungkin, PKS akan memasang kader kader PKS untuk tampil sebagai calon Bupati atau calon wakil Bupati yang akan bertarung pada Pilkada 2022 tersebut. Karena pada hakikatnya, dalam koalisi PKS yang menjadi pertimbangan adalah koalisi PKS secara organisasi bukan koalisi figure semata. Sudah barang tentu, Pilkada 2022 mempunyai efek yang kuat dalam Pemilu 2024 mendatang. Inilah tantangan dan peluang PKS mendatang. Semoga PKS terus berkhidmat untuk masyarakat. Semoga PKS semakin dicintai oleh masyarakat dengan pelayanan dan kiprah para wakil rakyat baik di Jakarta, Provinsi maupun tingkat kabupaten serta kerja kerja kader-kader PKS. Terutama dalam upaya mewujudkan cita cita masyarakat kecil yang akan diperjuangkan oleh FPKS di DPR RI melalui Undang-Undang agar SIM Seumur hidup, bebas Pajak Motor. Semoga demikian.

Lampiran Gambar 1.1

Kantor DPD PKS Musi Banyuasin



Sumber : instagram pksmusibanyuasin

Lampiran Gambar 1.2



Wawancara dengan bapak Amir Arifudin (Ketua DPD PKS Musi Banyuasin).

Lampiran Gambar 1.3



Wawancara dengan Bapak Ahmad Toha (Anggota Komisi I DPRD Provinsi

Lampiran Gambar 1.4



Wawancara dengan Bapak Feri Setiawan (Bendahara Umum PKS Musi Banyuasin).

Lampiran 1.5



Wawancara dengan Bapak Lutfi Amirudin (Wakil DPD PKS Musi Banyuasin).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.1924 /Un.09/VIII/PP.01/11/2019
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu di bimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka menyelesaikan penyusunan skrip
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik **an: Husain Abdurrahim, Tanggal 1 November 2019**
- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama :

Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Kun Budianto, M.Si	197612072007011010	Pembimbing I
Siti Anisyah, M.ASi	2012129302	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara :

N a m a	: Husain Abdurrahim
N I M	: 1527020008
Prodi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Analisis Terhadap Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Banyuasin Tahun 2019

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 7 November 2019 s/d 7 November 2020

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

- Tembusan:
1. Rektor;
 2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
 3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
 4. Ketua Prodi Ilmu Politik
 5. Mahasiswa yang bersangkutan
 6. Arsip

Palembang, 7 November 2019
Dekan,

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B. /Un.09/VIII/TL.01/10/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth
Ketua DPD PKS Musi Banyuasin
di
Tempat

Assalammu 'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :


Nama : Husain Abdurrahim
NIM : 1537020035
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Analisis terhadap Eksistensi PKS dalam Pileg di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019

Schubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

7 Oktober 2019


Izomiddin
Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 354668 website : www.fisip.radenfatah.ac.id





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

JL. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website :www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa : Husain Abdurrahim
 NIM : 1527020008
 Program Studi : Ilmu Politik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Analisis Terhadap Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019
 Pembimbing I : Dr. Kun Budianto, M.Si
 Pembimbing II : Siti Anisyah, M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	Selasa, 22 Oktober 2019	- Perbaiki latar belakang masalah - Teori yang digunakan	
2.	Kamis, 31 Oktober 2019	- ACC Bab I lanjut ke Bab II Konsultasi dengan pembimbing II	
3.	Selasa, 5 November 2019	- Perbaiki sistematika penulisan pada Bab II	
4.	Rabu, 20 November 2019	- ACC Bab II lanjut Bab III dan langsung bimbingan dengan pembimbing II lagi.	
5.	Senin, 9 Desember 2019	- Perbaiki Bab III	
6.	Jumat, 10 Januari 2020	- ACC Bab III lanjut ke Bab IV dan dapat diajukan ujian komprehensif	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website :www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
7.	Senin, 13 Januari 2020	- Perbaiki kesimpulan & Saran.	
8.	Selasa, 14 Januari 2020	- Tambahkan data yang diperlukan (Kata pengantar & Surat penunjang)	
9.	Kamis, 16 Januari 2020	- ACC Bab IV dan Keseluruhan.	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II**








Nama Mahasiswa : Husain Abdurrahim
NIM : 1527020008
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam
Pemilihan Legislatif di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019
Pembimbing I : Dr. Kun Budianto, M.Si
Pembimbing II : Siti Anisyah, M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	Senin, 21 Oktober 2019	Revisi Bab I	
2.	Rabu, 23 Oktober 2019	ACC Bab I	
3.	Jumat, 25 Oktober 2019	Penulisan Bab II	
4.	Senin, 28 Oktober 2019	Perbaikan Bab II (Visi-Misi PKS Musi Banyuasin)	
5.	Kamis, 31 Oktober 2019	ACC Bab II	
6.	Senin, 4 November 2019	Pedoman Wawancara	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website :www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
7.	Kamis, 21 November 2019	Penulisan Bab III	
8.	Selasa, 26 November 2019	Jalan Bab III	
9.	Selasa, 10 Desember 2019	Revisi Bab III (Konsultasi Analisis Wawancara).	
10.	Jumat, 13 Desember 2019	Sistematika penulisan	
11.	Kamis, 9 Januari 2020	ACC Bab III	
12.	Senin, 13 Januari 2020	Masuk Bab IV Kesimpulan & Saran	
13.	Kamis, 15 Januari 2020	ACC Bab IV dan keseluruhan	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari SEMIN tanggal 27 bulan JANUARI tahun 2020 Skripsi Mahasiswa :
N a m a : HUSAIN ABDURRAHIM
Nomor Induk Mahasiswa : 1527020008
Jurusan/Program Studi : ILMU POLITIK
Judul Skripsi : Analisis terhadap Strategi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Musi Banyuwasin tahun 2019

MEMUTUSKAN


1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini..... maka saudara dinyatakan : **LULUS/ TIDAK LULUS**,
Indeks Prestasi Kumulatif :, oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI). *Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)*.
2. Perbaiki dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

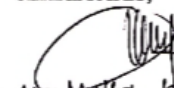
NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ainur Ropik, M.Si	Ketua Penguji	
2	Ary Musthofa Kawwami, M.Sos	Sekretaris Penguji	
3	Prof. Dr. H. Izomiddin, MA	Penguji Utama	
4	Mariatul Qibtiyah, MA.Si	Penguji Kedua	
5	Dr. Kun Budianto, M.Si	Pembimbing I	
6	Siti Anisyah, M.Si	Pembimbing II	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 27-01-2020

K E T U A,


Ainur Ropik, M.Si
NIP.

SEKRETARIS,


Ary Musthofa Kawwami, M.Sos
NIP.

BLANKO MUNAQASYAH



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

N a m a : HUSAIN ABDURRAHIM


N I M : 1527020008

Jurusan : ILMU POLITIK

Judul Skripsi : ANALISIS BERHADAP STRATEGI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KABUPATEN MUSI BANTUASIN
TH 2019

Telah dimunaqasyahkan pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun.....
dinyatakan ~~LULUS~~ / ~~TIDAK LULUS~~ Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :.....

Palembang,
Ketua


AINUR ROPIQ, M.S.
NIP.

Tembusan :

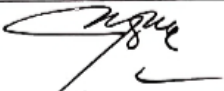
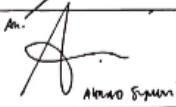
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Yang bersangkutan
3. A r s i p.

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Husain Abdurrahim
 NIM : 1527020008
 Program Studi : Ilmu Politik.
 Tanggal Ujian Munaqosah : 27 Januari 2020
 Judul Skripsi : Analisis terhadap strategi politik

Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan legislatif di kabupaten
Musi Banyuwasin tahun 2019


TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQOSAH dan TELAH
 DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI I dan DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. Izomuddin, MA	Penguji I	
2	Mariatul Qibtiyah, M.A.Si	Penguji II	 An. Mariatul Qibtiyah

Palembang, 9 Maret 2020

Menyetujui,


Dr. Kurni Budianto, M.Si
 Dosen Pembimbing I


Siti Anisyah, M.Si
 Dosen Pembimbing II

